

Skripsi

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM *MAKASSAR TA' TIDAK RANTASA* DI
KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA
MAKASSAR**

Diajukan Oleh :

ARJAN TOFANI RUKMAN

Nomor Stambuk : 105640205514



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM *MAKASSAR TA' TIDAK RANTASA* DI
KELURAHAN BONGAYA KECAMATAN TAMALATE KOTA
MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Dan Di ajukan Oleh :

ARJAN TOFANI RUKMAN

Nomor Stambuk : 105640205514

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMUSOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi Program
Makassar ta' Tidak Rantasa di Kelurahan Bongaya
Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Nama : Arjan Tofani Rukman

No. Stambuk : 105640205514

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Rudi Hardi, S.sos., M.si

Menyetujui

Dekan
FISIPOL Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos. M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip. M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor / Undangan menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0035/FSP/A.3-VIII/VI/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

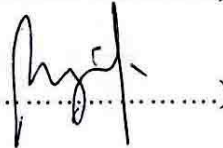
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

4. Handam, S.IP., M.Si


.....


.....


.....


.....

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama Mahasiswa : Arjan Tofani Rukman

Nomor Stambuk : 105640205514

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini, adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, ataupun lebih ditulis atau dipublikasikan orang lain atau juga melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu adalah pencabutan gelar akademik.

Makassar, 3 maret 2019

Yang menyatakan

Arjan Tofani Rukman

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Koordinasi Pemerintah **Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta’ Tidak Rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karna itu pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I dan bapak Rudi Hardi , S.Sos, M.si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penuilis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak dan Ibu penguji yang telah menguji penulis sehingga skripsi yang penulis miliki menjadi lebih baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang Telah Mengajar dan membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan peleyanan yang baik kepada penulis.
7. Teristimewa yang utama di sampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepadah ayahanda tercinta Rukman S Padang dan Ibuda tercinta Nur Hayati Noer atas segala pengorbanan dan Do'a restu yang telah di berikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut Ilmu sejak kecil sampai sekarang ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Aamiinn
8. Terutama kepada Muzdalifah Tamrin yang terus memberikan masukan dan dorongan juga memberikan motifasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsinya dan berjuang menata hidup kedepannya yang lebih baik lagi dan semoga dapat di persatukan dalam ikatan yang di restui oleh Allah dan kedua Orang tua.
9. Saudara-saudara penulis, Busman, Irfan S. pd, Agung rusmana putra S. pd, Nur Iskandar Haris, Khusnul Khatimah S. ip, Hijrawati, Yuliarti dewi Maruf S. ip, Dia sarfiah, Aprilia ruita Rukman, yang telah memberikan do'a dan bantuan kepada penulis dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun material.

10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2014 khususnya pada jurusan Ilmu Pemerintahan Kelas E
11. Seluruh aparat/pegawai kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Bongaya Kota Makassar yang senangtiasa memberikan bantuannya kepada penulis pada saat penelitian.
12. Seluruh Pihak-pihak Lain yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat di sampaikan satu persatu Namanya yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Mengiringi penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak, penulis hanya mampu untuk bermohon dan penuh harap kepada Allah SWT, karena hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan dan bantuan yang di berikan kepada penulis. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar , 3 Mei 2019

Arjan Tofani Rukman

ABSTRAK

ARJAN TOFANI RUKMAN ,. Koordinasi Pemerintah Dalam Implementasi Program Makassar ta' Tidak Rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar (dibimbing oleh Drs. H. Ansyari Mone, M.pd dan Rudi Hardi, S.Sos, M.Pd)

Artikel ini membahas tentang Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta tidak Rantasa. Permasalahan yang di hadapi saat ini adalah yaitu “bagaimana Koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan makassar ta tidak rantasa di kecamatan tamalate kelurahan bongaya Kota Makassar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini sudah berjalan dengan efektif dan dapat di simpulkan bahwa (1) Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta tidak rantasa di kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah berjalan dengan baik dengan meliputi indikator dalam Koordinasi yaitu (a) Komunikasi, pemerintah dalam menjalankan koordinasi Implementasi Makassar ta tidak rantasa menggunakan 2 cara dalam berkomunikasi yaitu secara lisan baikpun tulisan. Secara lisan dengan mengadakan sosialisasi terkait kebijakan MTR dan dengan tulisan yaitu dengan menggunakan media Sosial. (b) Kesepakatan dan Komitmen, pemerintah telah melakukan kesepakatan dan Komitmen dalam menjalankan implementasi Makassar ta tidak rantasa yaitu dengan memmbuat suatu kesepakatan antara Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Dan Kelurahan dalam tangkap tangan bagi masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya dan di berikan sanksi. (c) Kontinuitas Perencanaan. Dalam keberlanjutan implementasi kebijakan ini Pemerintah berencana mengadakan TPS 3R yang dimana memberikan sinegritas bagi masyarakat dan pemerintah di mana masyarakat adalah obyeknya.

Adapun factor-faktor yang mendukung dalam Koordinasi yaitu kesadaran dirisendiri, kedisiplinan dan sanks, dan factor penghabat yaitu keterbalikan dari factor pendukung. Dan apa yang di harap dari penelitian ini dapat membantu pemerintah kedepannya dalam menjalankan kebijakan mengenai masalah persampahan.

Kata Kunci : Koordinasi, Implementasi, Makassar ta Tidak rantasa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASSALIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Koordinasi.....	11
B. Konsep Organisasi	18
C. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan	19
D. Konsep Implementasi Kebijakan	23
E. Kebijakan MTR (Makassar ta' Tidak Rantasa)	25
F. Kerangka Pikir	27
G. Fokus Penelitian.....	30
H. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Analisis Data.....	36
G. Keabsahan Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	40
A. Deskripsi Dan Lokasi Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	40
2. Profil Instansi Obyek Penelitian	44
B. Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi kebijakan <i>Makassar ta tidak rantasa</i> dalam aspek persampahan	57
1. Komunikasi.....	58
2. Kesepakatan Dan Komitmen	63
3. Kontinuitas Perencanaan.....	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia demi memajukan kesejahteraan bersama diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, diantaranya manusia beserta perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, dan makhluk hidup lainnya.(Fatmawati,2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. sesuai dengan amanah UUD RI No. 18 Tahun 2008, maka pemerintah membuat peraturan tentang pengelolaan sampah. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. (Hamdan,2016)

Berdasarkan UU. No. 18 Tahun 2008 bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi, pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam menjalankan pelaksanaan konsep tersebut di lapangan semoga dapat diharapkan para instansi pemerintah dapat bekerjasama,

bersinergi, dan bahu membahu dalam mencapai tujuan atau hasil kebijakan yang diinginkan. Keterkaitannya dengan penanganan sampah, sinergi kebijakan sangat diperlukan untuk menyatukan atau menyamakan persepsi agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai secara efektif, efisien dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dari sampah. Sinergi (*Synergy*) ialah beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan win-win yang terbentuk dari kolaborasi masing-masing dari beberapa pihak tanpa harus merasa kalah. Sinergi ialah bentuk saling melengkapi dan mengisi beberapa perbedaan agar mencapai hasil yang melebihi dari jumlah bagian-bagian dari biasanya. Hakikat dari sinergitas yaitu merupakan bentuk interaksi dari dua pihak atau lebih dari satu yang menjalin hubungan dinamis guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama. (Muhammad Jusman, 2017).

Masalah Persampahan memang menjadi masalah utama dalam suatu Perkotaan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembenahan kebersihan lingkungan yang menjadi factor penyebab utama dalam kurangnya kebersihan di suatu lingkungan atau Daerah yang dapat menyebabkan berbagai masalah, yang salasatunya penyakit DBD (Demam Berdarah) atau malaria. DBD terjadi karna kurangnya kebersihan disuatu lingkungan atau daerah. yang di mana nyamuk malaria bisa berkembang biak bebas di tempat yang jauh dari kata Bersih. Tidak hanya itu, lingkungan yang kurang terawat atau lingkungan yang kurang Terjamak oleh tangan masyarakatnya sendiri dapat pula menimbulkan suatu permasalahan yang lain. yang dimana contohnya selokan atau saluran drainase yang di penuh oleh sampah dapat menyebabkan dampak masalah, yang di mana

masalah tersebut merugikan masyarakatnya sendiri. Contohnya selokan atau saluran drainase yang tidak terawat dan dipenuhi banyak sampah dapat menyebabkan selokan atau drainase tersumbat dan dapat menghambat saluran air dan juga menimbulkan banjir. Tidak hanya itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan membuang sampah disembarang tempat dapat juga menyebabkan banyaknya sampah yang bertumpukan dipinggir jalanan. Sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalanan sangat tidak elok di pandang mata dan terkadang mengganggu aktifitas masyarakat itu sendiri utamanya. Masalah persampah memang menjadi masalah yg lumrah atau biasa di Indonesia terutama di kota-kota yang padat penduduk. Masalah persampahan di kota-kota sudah lumrah atau tidak asing lagi di pandangan masyarakat. Tingginya factor konsumsi di suatu perkotan yang menyebabkan tingginya produksi sampah perharinya di kota-kota membuat pemerintah dan masyarakat kewalahan mengatasi sampah-sampah tersebut. Kesadaran masyarakat dalam dampak membuang sampah tidak pada tempatnya juga sangatlah minim.

Sampah-sampah yang di buang oleh masyarakat tidak pada tempatnya akan berhamburan dan berserakan dimana-mana. Masyarakat tidak sadar dampak besar yang akan terjadi di kemudian hari. Bukan hanya dari dampak yang terjadi tetapi dari segi penglihatan sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalanan atau di saluran pembuangan sangat tidak elok di padang mata. Dan sampah-sampah yang sudah lama di pinggir jalan dan menupuk atau di saluran-saluran drainase yang belum di tindak lanjuti dapat pula mengganggu kenyamanan

masyarakat, terutama bau dari sampah tersebut yang terbawa angin yang dapat membawa bau tak sedap kepada masyarakat itu sendiri.

Berbicara mengenai permasalahan sampah, Pemerintah jugalah sangat berperan penting di dalam tugas tersebut dan berkewajiban di dalamnya. Pemerintah ikut serta dalam membenahan atau penaggulangan samapah tersebut sebagai pelayan publik dan bertugas untuk mensejahtrahkan rakyatnya. Kebijakan Publik (*Public Policy*) ialah bentuk ketergantungan yang kompleks dari beberapa pilihan yang kolektif dan yang saling bergantung termaksud juga dengan beberapa keputusan untuk tidak mengambil tindakan yang telah dibuat kantor Pemerintah dan atau badan yang tertentu. Pembuatan kebijakan merupakan suatu bentuk tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada upaya pencapaian tujuan demi kepentingan masyarakat.

Kota Makassar yang memiliki luas areal 175,79 km² merupakan kota yang padat penduduk namun system tata ruang yang agak pelik di karnakan sistem penataan kota tidak di peruntukkan pada fungsi wilayah. Hal ini menyebabkan semerawutnya system tata kelola kota alasannya yaitu ada wilayah perumahan dari pertokoan berbaur menjadi satu. Masalah sampah adalah masalah klasik yang di hadapi tiap kota di dunia. Makassar yang berpenduduk ±2 juta jiwa tidak dapat menghindari masalah persampahan di kotanya.(Yamlikh azikin.2015)

Di dalam Kota Makassar berdasarkan data atau sample yang masuk hingga April 2014 pada Sub. Bagian Pengaduan pada Bagian Humas Sekretariat Kota Makassar, jumlah atau total aduan yaitu sebanyak 133 aduan, dan enam di antaranya terkait kebersihan. Sedangkan pada Mei ada sebanyak 126 aduan, dan

sembilan di antaranya terkait permasalahan kebersihan. Pada tanggal 12 Juni yaitu terkait tentang pengaduan masalah kebersihan mengalami peningkatan menjadi 13 aduan. Berangkat dari permasalahan-permasalahan ini dan *survey* yang terjadi di lapangan, maka Walikota Makassar pun langsung membuat kebijakan Makassar Tidak Rantasa (MTR) dengan berbagai pertimbangan. Sebagai suatu bentuk solusi dalam menangani permasalahan kebersihan yang ada (Asgun, 2014). Kebersihan, keindahan, dan kerapian sering kali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota. Seperti halnya yang ada di kota Makassar yang juga di kenal merupakan salah satu kota metropolitan. Pada 2014 timbunan sampah yang ada di Kota Makassar mencapai 4.301,18 m³ dan yang teratasi sebagian besarnya hanya sebesar 3.881,25 m³. Sisanya sebanyak 419,93 m³ sampah dan tidak dapat langsung diatasi oleh pemerintah Kota Makassar yang dalam tugas hal ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Hal tersebut ini juga merupakan permasalahan yang begitu sangat berat yang sementara dihadapi oleh Kota Makassar (Pallawa, Maharani, & Irwan, 2016).

Kebersihan ialah sebuah cerminan yang baik bagi setiap individu di dalam hal menjaga kesehatan yang begitu pentingnya dalam berkehidupan sehari-hari. Seperti halnya yang kita ketahui yaitu bahwahnya kebersihan ialah merupakan suatu bentuk keadaan yang terbebas dari segala segi pandangan beberapa aspek yaitu kotoran, penyakit, dan lain lain, dan yang dapat pula merugikan segala aspek yang menyangkut hal-hal setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Kebersihanpun dalam pendapat ajaran agama islam adalah sebagian dari iman. Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa halnya kehidupan manusia itu sendiri

tidak dapat atau juga tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam dan maupun lingkungan sosial. Maka sebagai individu harusnya segala aspek yang ada dalam masyarakat harus dapat menjaga kebersihan lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang bersih setiap individu maupun masyarakat akan menderita sebab sebuah faktor yang merugikan seperti kesehatan. Kesehatan itu sangatlah mahal harganya sehingga semuanya juga harus di olah dengan baik.

Seberapapun banyaknya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Makassar sejak pada tahun 2011 tentang hal pengelolaan sampah dan kemudian dilanjutkan dengan oleh Peraturan-peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan kepada Camat dalam ruang lingkup pemerintah Kota Makassar dengan maksud ditetapkannya peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan dalam ruang lingkup pemerintah Kota Makassar dan juga bertujuan agar lebih menyederhanakan sistem pemungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan. Makassar juga merupakan salah satu dari kota besar baik dari segi pandang perekonomian beserta volume penduduknya yang semakin meningkat baik di tambah lagi dari penduduk asli Kota Makassar sampai dengan pada orang-orang yang sedang merantau seperti halnya yang mencari kerja maupun yang sedang menempuh pendidikan di kota yang dikenal dengan kota daeng ini. Perkembangan ini membuat banyak kalangan yang menilai bahwa Makassar telah menjadi kota metropolitan serta menjadi salah satu kota

pusat perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Kota Makassar juga di kenal sebagai tempat wisata kuliner Sulawesi selatan.

Masalah kebersihan tidak kunjung selesai hampir di setiap kota di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahunnya dan terus-terus berlangsung dan tanpa ada solusi yang tepat dalam hal pelaksanaannya. Dalam hal ini Kondisi kota Makassar yang masih sangat jauh dari predikat kota yang bersih adalah beberapa hal yang saat ini masih menjadi info populer dan diangkat oleh banyak media berita di setiap harinya. Ketika sampah-sampah ini masih banyak berserakan dimana-mana hal ini kerap ditanggapi tidak sejalan dengan visi kota yang dimana bagian besarnya menjalankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau di kenal dengan sebagai istilah 3K. Maka dari sebab itulah kebersihan, keindahan dan kerapihan berulang-ulang menjadi tujuan utama beberapa kebijakan pemerintah Kota Makassar. Hal ini juga ialah sebagai bentuk masalah-masalah yang sangat bercampuran karena akan dihadapkan banyak hal salah satunya yaitu karakter atau perilaku masyarakat yang beragam.

Perilaku-perilaku masyarakat di perkotaan yang dimana saat ini relatif berbeda dalam hal menyikapi beberapa masalah kebersihan yang berkaitan erat relevansinya dengan pendidikan atau pengetahuan dalam hal kesehatan yang tidak merata. Hal inipun juga bisanya dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah berjalan dalam beberapa waktu yang lama meski tanpa adanya aturan atau sanksi yang bisa membuat jera. Masyarakat yang masi mempunyai kebiasaan-kebiasan tentang buang sampah bukan pada tempatnya telah membuat kondisi kota yang telah menjadi memprihatinkan maupun dari segipandang

kebersihan, keindahan dan kerapihan begitupun halnya dengan kesehatan masyarakat pada umumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang juga membahas mengenai Koordinasi dalam suatu permasalahan *Ilegal Fising* yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mana dalam judul artikel tersebut adalah “Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Mencegah *Ilegal Fising* di Kabupaten Kepulauan Selayar”. Dalam pembahasan artikel tersebut ada 5 (lima) indikator yang digunakan dalam pencegahan *ilgal fising* yaitu, (1). Komunikasi, (2). Kesadaran Masyarakat, (3). Kompetensi Partisipan, (4). Kesepakatan dan Komitmen, (5). Kontinuitas Perencanaan.

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam “Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam Mencegah *Ilegal Fising* di Kabupaten Kepulauan Selayar” yaitu bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian dalam pencegahan *illegal fising* di kabupaten Selayar. Dengan adanya hasil dari penelitian mengenai Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan kepolisian dapat membantu hasrat masyarakat dalam pencegahan *Ilegal Fising*.

Padatnya penduduk di kota makassar ini maka menimbulkan beberapa masalah yang di mana masalah persampahan menjadi masalah utama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya pemerintah kota Makassar membuat suatu kebijakan untuk menanggulangi masalah persepahan tersebut, yang di mana kebijakan itu sekarang di kenal dengan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Melihat gagasan atau uraian latar belakang yang ada di atas maka peneliti tertarik untuk

menggagas judul skripsi yaitu “**Koordinasi Pemerintah Dalam Implementasi Program Makassar ta’ Tidak Rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tammalate Kota Makassar**” dan juga sebagai salah satu tugas perkuliahan yang ditetapkan untuk beranjak ke tahap yang selanjutnya dalam perkuliahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Bagaimana Koordinasi Pemerintah Dalam Implementasi Program Makassar Ta’ Tidak Rantasa Di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertuju Untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Dalam Implementasi Program Makassar ta’ Tidak Rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil dari penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran atau pemahaman bagi peneliti lainnya yang juga ingin meneliti lebih komprehensif dan lebih lanjut tentang hal Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar Ta’ Tidak Rantasa Di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tammalate Kota Makassar.

b. Hasil dari penelitian ini juga sangat Di harapkan dapat membantu dan Menambah Ilmu atau pengetahuan dari si Pembaca ataupun si penulis dan memperluas wawasan berpikir Mahasiswa-mahasiswa tentang berbagai konsep-konsep atau teori-teori yang menyajikan atau memberikan informasi yang dibutuhkan dan juga data-data valid yang dalam penelitian tentang Koordinasi Pemerintah Dalam Implementasi Program Makassar ta' Tidak Rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam program Makassar ta Tidak Rantasa dalam aspek Persampahan Bagi Pemerintah Kota dan Masyarakat di Kota Makassar tentang dampak yang negative yang terjadi di bagian pengolahan sampah. Dan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat untuk lebih memahami implementasi program Makassar ta' Tidak Rantasa, dan dapat pula mengaplikasikan atau menjalankan pemahaman yang dapat di ambil dari penelitian ini.

Juga menjadi pembelajaran tersendiri bagi masyarakat yang belum betul memahami atau mengerti dari program tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu system fungsi dari manajemen yang memegang peranan-peranan yang sama pentingnya dan juga besetara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dan juga Koordinasi ialah salah satu bentuk dari Hubungan kerja yang memiliki karakteristik yang khusus. Pentingnya Koordinasi dikarenakan untuk menyatukan dan menyelaraskan unsur yang berbeda. Pendapat lain mengatakan koordinasi ialah bentuk penyesuaian dari masing-masing bagian yang terhubung dan usaha untuk menggerakkan serta mengoprasikan bagian yang tertentu pada waktu yang sinkron, dan pada akhirnya yang serta demikian pada masing-masing bagian juga dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil, White dalam Syafei (2011:33).

Koordinasi adalah wujud kerjasama antara suatu badan atau unit kerja yang saling berkaitan baik dalam lingkup pemerintah maupun lingkup perorangan. Koordinasi Pemerintah adalah Koordinasi yang di laksanakan dalam organisasi pemerintah, masalah kerjasama antar aparatur pemerintahan dan pertalian satu sama lainnya, Aisyah (2013:142). koordinasi di maknai juga sebagai salah satu usaha bekerja sama antara badan, instansi, unit dalam menjalankan tugas-tugas yang tertentu, sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sehingga, pada akhirnya koordinasi dapat di maknai sebagai suatu

bentuk usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas ataupun halnya dengan kegiatan di dalam organisasi, Djamin dalam Hasibuan (2011:2016).

Beberapa para ahli yang mengemukakan, mengartikan atau mendefinisikan Koordinasi itu sendiri. G.R Terry Koordinasi adalah sebuah usaha yang selaras dalam untuk menyediakan waktu dan jumlah yang sudah tepat dan mengiringkan pelaksanaan untuk dapat menghasilkan atau membuat suatu tindakan yang harmonis dan seragam pada sasaran atau tujuan yang telah di tentukan. E.F.L Breach Koordinasi di artikan yaitu menggrakkan dan mengimbangi tim dengan menyediakan lokasi kegiatan untuk pekerjaan yang selaras pada masing-masing dan juga menjaga agar kiranya kegiatan yang terpilih terlaksanakan dengan keselarasan juga dengan semestinya di antara anggota-anggota itu sendiri. M.c Farland Koordinasi di maksudkan ialah suatu bentuk proses yang di mana pimpinan mengembangkan bentuk-bentuk usaha kelompok secara tersusun di antara bawahannya dan menjaminkan kesatuan tindakan-tindakan di dalam pencapaian tujuan Bersama. Handoko Koordinasi diartikan juga dengan proses pengitegrasian pada tujuan-tujuan dan juga kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen ataupun juga pada bidang fungsional) suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi dengan efesien. (Tini Martini, 2015).

Koordinasi sangat di perlukan juga dalam manajemen, apalagi terutama untuk menggabungkan persamaan pandangan diantara berbagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan dan kegiatan organisasi. Koordinasi di butuhkan untuk menyambungkan bagian-bagian satu dengan bagian yang lainnya dan pada akhirnya tercipta suatu kegiatan-kegiatan yang terpadu mengarah pada satu tujuan

umum Lembaga sebagaimana tulang-tulang kerangka payung. Tanpa adanya koordinasi, pembagian kerja dan spesialisasi yang dilakukan tiap usaha kerjasam akan sia-sia karna setiap bagian akan cenderung dan hanya akan memikirkan tugas atau pekerjaan masing-masing dan melupakan tujuan Lembaga secara menyeluruh.

Ada beberapa pembegain mengenai Koordinasi tersebut yaitu :

a. Ciri-ciri Koordinasi

Dalam bukunya Soewarno Handayaniingrat, Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional (1991), ciri-ciri Koordinasi yaitu :

1. Bahwa tanggung jawab koordinasi ialah terletak kepada pimpinan. Oleh karnanya, koordinasi dikatakan merupakan tugas pemimpin. Koordinasi juga sering dicampur adukkan dengan kata koperasi, yang meskipun sebenarnya mempunyai makna atau arti yang berbeda. Demikian pula halnya pada pimpinan tidak akan mungkin mengadakan Koordinasi jika mereka tidak ingin melakukan kerjasama. Maka karna itu, kerja sama merupakan sesuatu syarat-syarat yang begitu penting dalam membantu terlaksanakannya koordinasi.
2. Adanya proses (*continues process*). Karna koordinasi juga dikatakan pekerjaan pimpinan yang juga di yakini bersifat berkesinambungan dan harus di kembangkan, agar dapat mencapai tujuan dengan baik.
3. Pengaturan dengan teratur pada usaha kelompok. Sebab karna itu koordinasi juga dimaknai dengan konsep yang telah ditetapkan pada kelompok, dan tidak pada usaha individu. Maka sejumlah individu yang telah di tetapkan bekerjasama, maka dengan koordinasi yang dimana menghasilkan bentuk

usaha kelompok yang sangat penting agar tercapainya suatu efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih ketidak jelasan dalam tugas pekerjaan yang merupakan tanda dari kurangnya kesempurnaan koordinasi.

4. Konsep tentang kesatuan tindakan. Hal ini juga merupakan bagian inti dari koordinasi. Kesatuan Usaha, yang berarti harus mengatur sedemikian bentuk usaha-usaha setiap kegiatan individu sehingga didalamnya terdapat keserasian di dalam pencapaian hasil.
5. Tujuan Koordinasi ialah tujuan bersama, kesatuan dari usaha menginginkan dan meminta satu pengertian kepada keseluruhan individu, untuk ikut serta dalam melaksanakan tujuan sebagai kelompok yang di mana mereka bekerja.

Adapun beberapa pendapat yang mengemukakan ciri-ciri koordinasi tersebut yaitu : (a). Tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimpin. (b). Koordinasi ialah juga suatu usaha kerja sama. (c). Koordinasi adalah suatu proses yang terus menerus. (d). Adanya aturan-aturan usaha kelompok secara teratur. (e). Koordinasi Adalah Konsep kesatuan tindakan Bersama. (f). Tujuan Koordinasi adalah tujuan Bersama. (Mirwan,2013)

b. Jenis Koordinasi

Soewarno Handayani (1991), jenis koordinasi ada 2 yang utama yaitu Koordinasi intern dan Koordinasi ekstern :

1. Koordinasi intern terdiri atas Koordinasi Horizontal, Koordinasi Vertikal, dan Koordinasi Diagonal :

- a. Koordinasi Vertikal atau juga Koordinasi Struktural, yang dimana antara mengkoordinasikan secara structural terdapat hubungan hierarki. Hal ini juga dapat di katakana Koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu dengan yang lain berbeda pada satu garis Komando (*line of commad*). Misalnya yaitu koordinasi yang akan dilakukan oleh seseorang deputi terhadap para asisten deputi, atau kepala direktorat terhadap kepala sub-direktorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya.
- b. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimana antara kedudukan yang mengkoordinasikan dan yang dikordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut fungsi dan tugasnya ke duaduanya mempunyai kaitan satu sama yang lain dan sehingga di perlukan koordinasi. Misalnya (i) koordinasi yang dilakukan oleh kepala Biro perencanaan departemen terhadap para kepala-kepala Direktorat bina Program pada tiap direktorat jendral satu departemen; (ii) koordinasi yang telah dilakukan oleh menteri suatu kementrian (katakanlah kementrian koordinator) terhadap para menteri lainnya.
- c. Koordinasi Diagonal yaitu koordinasi fungsional, yang di mana halnya mengkoordinasikan memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi tingkat eselonnya di bandingkan yang di koordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando, (*line of command*). Misal contohnya koordinasi yang telah dilakukan oleh kepala biro kepegawaian pada sekretariat Jendral departemen terhadap para kepala bagian kepegawaian secretariat di rektorat jendral suatu departemen.

2. Koordinasi ekstern, termaksud Koordinasi fungsional. Dalam Koordinasi Ekstern yang bersifat Fungsional, Koordinasi itu hanya bersifat Horizontal dan juga Diagonal.

Sebagian ahli hanya membagi Koordinasi menjadi dua kelompok besar yakni, koordinasi Horizontal dan Koordinasi Vertikal. Koordinasi vertikal ini secara relative mudah di lakukan, karna atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit di atur. Koordinasi horizontal ini terbagi atas *interdisciplinary* juga *interrelated*. *Interdisciplinary* yang artinya ialah Koordinasi didalam rangka mengarahkan, mewujudkan, menyatukan tindakan, dan menghasilkan disiplin antara satu unit dengan unit yang lainnya secara ekstern dan intern kepada unit-unit yang tugasnya sama. Sedangkan *interrelated* adalah Koordinasi antara badan instansi beserta beberapa unit yang tugasnya berbeda, akan tetapi halnya instansi yang satu dengan instansi yang lainnya saling mempunyai ikaitan atau juga saling bergantung secara ekstern atau intern yang tahapan levelnya sama atau setaraf. Koordinasi horizontal ini relative sulit di lakukan, sebab Koordinator tidak bisa memberikan sanksi atau hukuman kepada pejabat yang sulit diatur karna kedudukannya setara atau setingkat. (Eka Ningrum:2015).

- c. Tujuan Koordinasi

Sembiring (2012). Tujuan koordinasi yaitu adalah untuk memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan berbagai kepentingan-kepentingan dan juga kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain beserta segenap gerak, tindakan dan waktunya untuk rangka dalam pencapaian sasaran dan tujuan Bersama.

Koordinasi juga sangat di butuhkan dalam manajemen, utamanya untuk menyatukan persamaan pandangan di antara berbagai pihak yang juga berkepentingan dengan tujuan dan kegiatan organisasi. Koordinasi sangat dibutuhkan untuk menghubungkan bagian satu dengan bagian-bagian yang lain dan sehingga terciptanya suatu kegiatan terpadu yang mengarah kepada tujuan umum Lembaga yang sebagaimana susunan kerangka payung. Tanpa koordinasi, spesialisasi dan bagian-bagian kerja yang telah dilakukan kepada tiap-tiap usaha kerja sama akan menjadi sia-sia sebab setiap bagian hanya cenderung memikirkan tugasnya atau pekerjaannya masing-masing dan melupakan tujuan akan Lembaga secara menyeluruh.

d. Indikator Koordinasi

Handayani (1991:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat di ukur melalui indikator:

1. Komunikasi; a). ada tidaknya informasi; b). ada tidaknya alur informasi; c). ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran masyarakat a). ada tidaknya kesadaran masyarakat
3. Kompetensi partisipan; a). ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat; b). ada tidaknya ahli di bidang yang berwenang yang terlibat
4. Kesepakatan dan komitmen a). ada tidaknya bentuk kesepakatan; b). ada tidaknya pelaksana kegiatan; c). ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
5. Kontinuitas perencanaan; a). ada atau tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan; b). ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

B. Konsep Organisasi

Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang di dalamnya Organisasi juga di artikan sebagai Kesatuan (Susunan) yang juga terdiri dari Bagian-bagian (orang) dalam suatu perkumpulan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kelompok yang sedang kerjasama, yaitu orang-orang yang diadakan atau terkumpul untuk tercapainya tujuan bersama. Secara umum organisasi di maknai sebagai perkumpulan manusia yang berkumpul dalam suatu lingkaran dengan bermaksud untuk mencapai tujuan yang di inginkan Bersama atau yang telah di tentukan dalam kelompok tersebut.

Teori-teori mengenai Organisasi yang berkembang sejalan dengan perkembangan yang mengenai cara pandang tentang dunia ini (paradigma. *World viuw*). Dalam eksistensi Organisasi komunikasi sangat penting di dalamnya karena berperan banyak dari pada sekedar melaksanakan rencana-rencana organisasi, karna melaksanakan rencana organisasi tidak akan mungkin terlaksanakan dengan baik jika tidak di Komunikasikan dengan baik-baik dan jelas. Sehingga di dalam Organisasi komunikasi menjadi poin atau factor utama. Organisasi tidak akan berjalan baik tanpa adanya komunikasi, jika tanpa komunikasi dalam sebuah organisasi maka dapat memunculkan berbagai permasalahan seperti informasi yang minim, dan tidak akan sesuai apa yang di harapkan oleh organisasi. (Gilang Pramudeta:2017).

Analisis Organisasi sebagai system yang terbuka juga sangat relevan juga untuk di gunakan Organisasi manapun, terutama Birokrasi pemerintah. Kajian tentang suatu Organisasi sebagai suatu bentuk pendekatan yang terbuka, pada

perinsipnya yaitu mengkaji proses adaptasi Organisasi Terhadap Lingkungannya. Proses adaptasi ini juga dilakukan dimulai dari hulu (*backward linkages*) dan sampai ke hilir (*foreward linkages*), yaitu dimulai dari yang pertama lingkungan input didalam upayanya untuk bisa memperoleh sumberdaya (*resources*) yang juga diperlukan, sampai dengan kepada lingkungan *output* yaitu untuk menawarkan beragam macam produk-produk yang telah dihasilkannya. Dengan begitu, maka bagi suatu Organisasi, bahwa kegiatan-kegiatan adaptasi terhadap lingkungannya ini juga merupakan satu keniscayaan, yaitu ialah dengan melakukan tindakan-tindakan yang strategis guna agar organisasi juga dapat atau bisa melakukan suatu transaksi-transaksi yang timbal balik dan juga dapat saling menguntungkan dengan lingkungannya.

Bagi dalam suatu bentuk organisasi, bahwa kegiatan-kegiatan beradaptasi terhadap lingkungan yang di tempati merupakan suatu keniscayaan, yaitu juga dengan melakukan suatu tindakan-tindakan strategis supaya organisasi dapat pula melakukan suatu transaksi yang timbal balik dan juga yang saling menguntungkan dan mendapat hal yang baik dengan lingkungannya. Sementara itu, para ahli organisasi lainnya yang menganut analisis populasi mengemukakan bahwa proses perubahan organisasi berlangsung melalui mekanisme seleksi. (Heru Nurasa:2013)

C. Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah sebagai kumpulan-kumpulan orang yang sedang mengelola kewenangan-kewenangan, menjalankan atau melaksanakan hal kepemimpinan dan Koordinasi Pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan juga organisasi atau

tempat orang yang memiliki kekuasaan dan juga lembaga yang mengurus masalah-masalah kenegaraan atau Negara dan juga mengurus kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga di artikan yaitu organisasi kekuasaan yang telah membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah-wilayah tertentu dalam Pemerintahan dalam arti luas yaitu segala urusan-urusan yang telah dilakukan oleh Negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan seluruh rakyatnya dan juga untuk kepentingan Negara sendiri. Jadi, tidak juga diartikan dengan sebagai pemerintah yang hanya pula menjalankan tugas-tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas yang lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi Pemerintahan juga dapat ditemukan di dalam konstitusi yang berupa fungsi peradilan, PAB (perencanaan anggaran belanja), Militer, Polisi dan pajak. Rasyid membagi fungsi-fungsi Pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, Pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), Pemberdayaan (*empowering*), dan Pengaturan (*regulation*).

Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan Pemerintah dari arti kata Perintah ialah perkataan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu, menguasai dan mengatur negara atau daerah. Pemerintah (*government*) dan juga di lihat dari pengertiannya ialah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Pemerintahan juga dapat di artikan *The Governing Body of a Nation, State, City, etc* yang artinya badan atau Lembaga yang mengadakan atau menjalankan Pemerintahan Negara, Negara bagian, atau Kota dan juga sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya, adalah Pemerintah dalam arti kata luas meliputi

keseluruhan kekuasaan yaitu, kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif. Dan sedangkan pemerintah yang dalam arti sempit yaitu hanya meliputi cabang kekuasaan Eksekutif saja. (Riawan trianda:2009).

Sistem Pemerintahan ialah sebutan atau nama yang populer dari bentuk segi Pemerintahan. Hal ini juga didasari dari pemikiran-pemikiran bahwa bentuk dari Negara adalah peninjauan secara Sosiologis, dan sedangkan dengan secara Yuridis disebut juga bentuk Pemerintahan, yaitu adalah sistim yang berlaku yang dimana menentukan bagaimana hubunga atau relasi antara alat perlengkapan negara yang diatur oleh Konstitusinya. Karena dari itu Pemerintahan sering dan lebih Populer dan disebut juga dengan sebagai sistem pemerintahan.(Muliadi Anangkota:2012).

Adapun di bawah ini mengenai jenis system Pemerintahan yaitu :

Sistem Pemerintahan adalah sebutan yang populer dan dikenal juga dari bentuk Pemerintahan. Hal ini didasari dari pemikiran-pemikiran bahwa yaitu bentuk negara ialah peninjauan secara Sosiologis, dan sedangkan secara Yuridis disebut juga dengan bentuk pemerintahan, yang artimya yaitu sistim yang berlaku dan yang menentukan bagaimana hubungan-hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk Pemerintah sering dan juga lebih populer disebut dengan system Pemerintahan. Pemerintahan sebenarnya ialah lebih berfokus pada seberapa besar kedudukan, peran, dan juga kewenangan antara Lembaga Legislatif dan Lembaga eksekutif serta rakyat. Menurut (Syafiie:2011). System pemerintahan terbagi menjadi 3 yaitu :

1. System Pemerintahan Parlemerter, untuk mengawasi Eksekutif, legis latif menggunakan system Parlemerter, jadi kekuasaan parlemen lebih besar dari pada eksekutif. Dalam sistem ini Dewan Menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen. sistem menggambarkan keadaan dimana lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif membuat lembaga eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya. Akan tetapi karena perdana menteri (Eksekutif) juga memiliki kewenangan yang kuat juga di karenakan berasal dari suara mayoritas Parlemen, maka perdana Menteri sulit untuk juga di jatuhkan.
2. System Pemerintahan Presidensial, sistem ini presiden (eksekutif) mempunyai kekuasaan kuat juga, sebab selain kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan Negara yang juga sekaligus mengetuai kabinet (dewan menteri). Maka karena itu agar tidak menjurus kepada Diktatorisme, oleh sebab itu diperlukanlah *check and balnces*, antara lembaga tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan *cheking power with power*. Adapun juga yang mengartikan sistem Presidensial yang dimana menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh Parlemen, melainkan bersama Parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau masyarakat yang melalui pemilihan umum. Karena itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, sehingga Parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden dan kabinetnya. Sebaliknya Presidenpun tidak membubarkan Parlemen. Sesuai dengan ketentuan konstitusi dan berakhirnya masa jabatan maka kedua Lembaga ini menjalankan tugas yang di tetapkan.

3. Sistem Pemerintahan Campuran (Quasi), Sistem Quasi atau campuran adalah sistem Pemerintahan yang memadukan beberapa kelebihan-kelebihan dari sistem Pemerintah Presidensial dan Parleментар. Di dalam system ini di usahakan yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Di dalam system Pemerintahan ini, di samping memiliki Presiden sebagai kepala Negara, di system pemerintah campuran ini juga memiliki Perdana Menteri yang sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin Kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada Parleментар. Bila President tidak diberi Posisi yang dominan di dalam sistem Pemerintahan ini, Presiden sekedar tidak lebih dari lambang dalam pemerintahan. Akan tetapi presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, selain itu bahwa Presidenpun dapat membubarkan Parleментар.

D. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses untuk mengubah kebijakan dalam praktek. Namun, itu adalah umum untuk mengamati apakah terjadi gap antara apa yang direncanakan dan apa yang sebenarnya terjadi sebagai akibat dari kebijakan. Purwanto dan Sulistyastuti,(2012:20) mengartikan ke dalam implementasi kebijakan ke beberapa kata kunci bahwa yaitu, untuk menjalankan suatu kebijakan (*to carry out*), dan untuk memenuhi janji yang sebagaimana telah dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), juga untuk menghasilkan output yang sebagaimana telah dinyatakan di dalam tujuan kebijakan (*To Produce*), dan yang untuk menyelesaikan tugas yang harus diwujudkan yang ada dalam tujuan Kebijakan (*To Complete*). Van Meter dan Van Horn (1974) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, *Policy Implementation Encompasses Those*

Actions By Public Or Private individuals (our groups) That are Directed at The Achievement Of Objectives set Forth in Prior Policy Decisions. Yang mengutip tentang pertanyaan dari Nugroho (2012:674) yang dapat di simpulkan bahwa Implementasi kebijakan ialah suatu bentuk cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak kurang dan lebih, yang di mana terdapat dua pilihan yang langkah juga dapat dilakukan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, yaitu dengan langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program, atau juga melalui Formulasi kebijakan Derivat atau juga turunan dari Kebijakan Public tersebut. Kebijakan turunan yang artinya yang di mulai dari kebijakan Public dan kemudian di turunkan ke dalam program, dan kemudian di lanjutkan ke dalam proyek, dan di implementasikan ke dalam suatu bentuk kegiatan yang di berikan ke dalam pemanfaat atau juga kelompok sasaran. (Iqbal aidal idrus:2017).

Merilee S. Grindle mengatakan bahwa Implementasi adalah suatu bentuk kaitan (linkage) yang bertujuan memudahkan tujuan-tujuan kebijakan yang biasa direalisasikan sebagai suatu dampak dari kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang sedemikian dan dijalankan dengan pengharapan sampai kepada tujuan yang telah di inginkan. (Winarno, 2012:149).

Syukur mengemukakan ada tiga unsur-unsur yang penting didalam proses Implementasi yaitu: (1) adanya kebijakan atau program yang di jalankan (2) Target Group yaitu Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi tujuan dan yang ditetapkan akan menerima manfaat-manfaat dari program, peningkatan atau perubahan (3) unsur dalam (Implementor) baik itu Organisasi atau perorangan

untuk bertanggung jawab didalam mencapai pengawasan dan pelaksanaan dari proses-proses Implementasi tersebut. (Haerul:2016).

E. Kebijakan MTR (*Makassar ta' Tidak Rantasa*)

Kota Makassar telah membuat peraturan daerah tentang masalah sampah yaitu Perda kebersihan nomor 11 tahun 2011, di dalam perda tersebut terdapat peraturan mulai dari hak dan kewajiban warga kota Makassar sampai kepada denda yang di jatuhkan kepada warga apabila membuang sampah secara sembarangan. Kata “Rantasa” merupakan Bahasa lokal yang berarti Kotor, jorok, tidak teratur. Namun dalam program Makassarta' tidak rantasa dimaknai secara luas yang tidak hanya sebatas mengartikan Rantasa itu adalah sampah yang berserak-serakan atau juga kanal dan got yang penuh dengan sampah, tapi juga menata Ketidak aturan atau kesemrawutan di instansi-instansi pemerintah yang seperti halnya perilaku-perilaku yang jorok contohnya seperti korupsi, suap menyuap, dan calo-calo didalam bentuk-bentuk pengurusan administrasi sehingga menciptakan Good Government.

Kebijakan Publik (*Public Policy*) ialah suatu pola bentuk ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan yang kolektif dan saling bergantung, dan termasuk juga keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang telah dibuat oleh badan atau kantor Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengatasi persoalan sampah, Pemkot Makassar mengeluarkan Perda. No. 4 Tahun 2011, tentang pengelolaan sampah, Perda. No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Kebijakan Program Makassar ta' Tidak

Rantasa' (MTR), 15 Juni 2014, tentang penanganan kebersihan, dengan sejumlah strategi untuk mencapai keberhasilannya antara lain: a). Kerja bakti (TNI/Polri), b). Jumat Bersih, c). MABELLO (Makassar bersih lorong-lorong ta'), d). LISA (Lihat sampah ambil), e). menuju MABASA (Makassar Bebas Sampah).(Muhammad Jusama:2017).

Program kebersihan lingkungan Makassar' Tidak Rantasa yang di canangkan oleh pemerintah kota Makassar adalah program yang harus disampaikan kepada warga melalui pihak kelurahan. Disisi lain dari pemahaman aparat kelurahan tentang perogram tersebut perlu dikuasai agar aparat kelurahan dapat menjelaskan apa tujuan dari program kebersihan lingkungan Makassar' Tidak Rantasa. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar, langsung disampaikan ke seluruh SKPD yang ada dikota makassar untuk dijalankan, namun penyampaian program ini tidak disertai dengan dokumen tata cara pelaksanaan program, yang diterima oleh SKPD khususnya kelurahan hanyalah garis besar mengenai program tersebut.

Program LISA merupakan bagian dari kebijakan Makassar' Tidak Rantasa. Program ini mendukung masalah kebersihan sampah yang ada di kota Makassar. Kebijakan LISA diharapkan menjadi solusi kebersihan kota Makassar untuk mencapai Makassar kota Dunia yang terhindar dari berbagai macam permasalahan sampah dan keindahan kota. Kebijakan LISA salah satu kebijakan pendukung program Makassar' Tidak Rantasa yang isi kebijakannya langsung pada target sasaran yaitu masyarakat kota Makassar. Diharapkan masyarakat kota Makassar ikut berperan dalam mengambil sampah ketika melihat sampah

disekitarnya. Gerakan LISA merupakan rangkaian aksi unggulan dari implementasi program MTR. Program LISA merupakan salah satu kegiatan unggulan Pemerintah Kota Makassar yang membantu agar kebersihan kota terpelihara sepanjang waktu. Gerakan LISA bertujuan menyadarkan masyarakat kota Makassar pentingnya kebersihan bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Untuk mewujudkan hal itu, agar masyarakat berinisiatif tidak membuang sampah sembarangan, mengambil sampah yang ditemui di jalan dan membuangnya pada tempat sampah yang telah disediakan gerakan LISA perlu untuk dirangkaikan dengan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan MTR. Dalam implementasi kebijakan LISA, maka perlu diperhatikan sejumlah faktor yang berinteraksi satu dengan yang lain dan faktor dimaksud adalah isi kebijakan, lingkungan politik, kelompok sasaran dan lingkungan. Dengan demikian keempat faktor implementasi kebijakan tersebut merupakan sebuah *sub system* yang saling berkaitan dapat dijadikan instrument dalam melihat keberlakuan system input, proses dan output dalam system implementasi kebijakan. (Nasrulhaq:2017).

F. Kerangka Pikir

Kerangka piker penelitian ini berdasarkan teori mengenai koordinasi yang telah diuraikan di atas. Dalam teori tersebut dapat di Tarik kesimpulan menurut (Syafiie:2011). Menyatakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dari berbagai organisasi atau unit-unit dalam pemerintahan yang berbeda yang bersifat mengikat serta terarah pada suatu pencapaian tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Kaitannya dengan

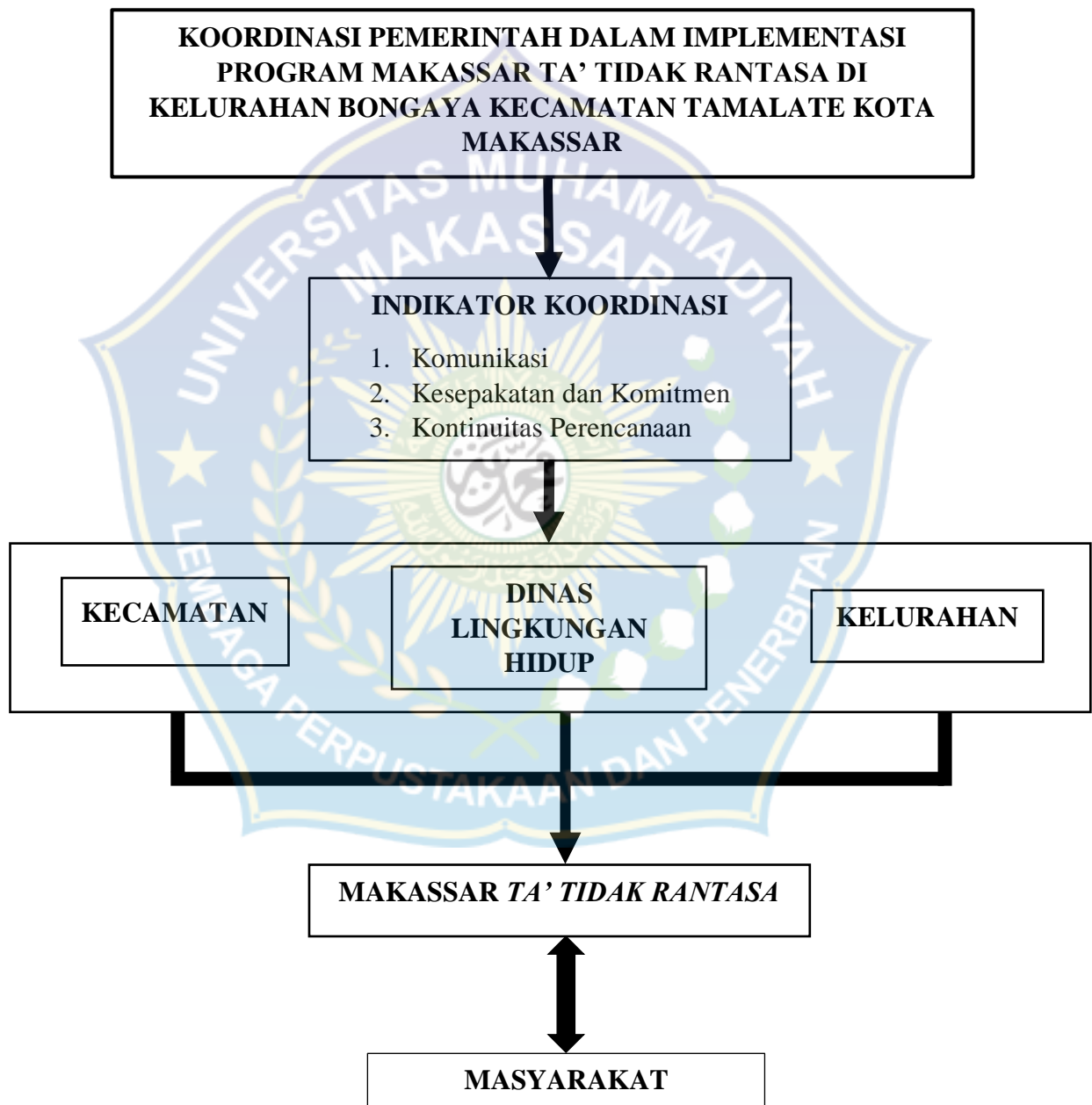
Koordinasi antar organisasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta' Tidak Rantasa di Kecamatan Tamalate Kota Makassar antara lain untuk dapat mewujudkan terselenggaranya indikator-indikator Koordinasi yaitu: a). Komonikasi, b). Kesadaran Masyarakat, c). Kompetensi Partisipan, d). Kesepakatan, e). Komitmen, f). Kontinuitas Perencanaan. Dalam hal ini Koordinasi yang di gunakan yaitu Koordinasi inter, yang dimana arti kata inter menurut KBBI itu adalah (di) antara dua; (di) antara; di tengah yang dimana Koordinasi yang di maksudkan yaitu vertikal.

Terselenggaranya koordinasi sebuah instansi merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dan membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal pencapaian tertentu yang dapat memuaskan keinginan masyarakat. Dan pemerintah harus terlibat atau turun langsung dalam melaksanakannya. Karna dengan begitu kenyamanan masyarakat dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi dan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam melaksanakannya. Maka dari itu sangat di butuhkan koordinnasi dalam suatu pencapaian tertentu dalam pemerintahan.

Oleh karna itu, di perlukan pengembangan penerapan system kerjasama, pertanggung jawaban yang tepat, jelas,nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara berkesinambungan, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian di atas, untuk menganalisa penerapan koordinasi instant yang terkait dalam implementasi Program Mkassar tidak rantasa di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, penelitian akan mengamati

variable tersebut sebagai phenomena pengamatan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bagan kerangka pikir dari penelitian ini yaitu :

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian di rumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah “Koordinasi Antar Organisasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta tidak Rantasa di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”.

Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal yang perlu di uraikan yaitu :

- a. Komonikasi; 1). ada tidaknya informasi; 2). ada tidaknya alur informasi; 3). ada tidaknya teknologi informasi
- b. Kesepakatan dan komitmen; 1). ada tidaknya bentuk kesepakatan; 2). ada tidaknya pelaksana kegiatan; 3). ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
- c. Kontinuitas perencanaan; 1). ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan; 2). ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji tentang Koordinasi kedua kubuh yang menjalankan tugasnya masing-masing. antara lain kerjasama antara pemerintah kota dan masyarakat dalam melakukan implementasi program makassar ta tidak rantasa. dalam hal ini tentunya berkaitan dengan peran atau langkah masing-masing yang di lakukan oleh kedua kubuh tersebut dalam melakukan koordinasi.

Adapun defenisi fokus penelitian yang di maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Komunikasi : ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi dan juga ada tidaknya teknologi informasi.

Komunikasi adalah aktifitas dasar dari kehidupan manusia, dengan berkomunikasi manusia dapat berinteraksi dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia perlu berkomunikasi, tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi merupakan unsur penting bagi kehidupan manusia. Sebagai konsekuensi makhluk sosial, setiap manusia akan melaksanakan kegiatan komunikasi bila ingin mengadakan hubungan dengan pihak lain. Maka dari itu komunikasi sangat diperlukan dalam Koordinasi antara Organisasi pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta' tidak Rantasa di kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk menghubungkan Masyarakat dan Pemerintah kota Makassar dalam hal tersebut. Dan dengan komunikasi masyarakat dan pemerintah dan menemukan titik temu dalam melaksanakan program Makassar ta tidak rantasa.

2. Kesadaran masyarakat : Ada tidaknya kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah adanya inisiatif sumber daya manusia untuk memahami dampak dari kegiatan-kegiatan yang dapat melanggar berbagai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya masalah-masalah yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Kompetensi partisipan : Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat; b). ada tidaknya ahli di bidang yang berwenang yang terlibat

Dalam hal ini adalah lebih kepada bagaimana kemampuan atau keahlian atau juga lebih kerennya juga di sebut kapabilitas pemerintah kota makassar di kecamatan tamalate dalam implementasi program makassar ta tidak rantasa. Karna dengan demikian hasil yang optimal dapat dengan mudah tercapai. Dan hasil pada akhirnya juga pasti lebih efisien dan efektif.

4. Kesepakatan dan komitmen : Ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan dan juga ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan.

Kesepakatan dan komitmen Pemerintah kota Makassar dalam Koordinasi Pemkot makassar dalam implementasi MTR di kecamatan Tamalate kota Makassar dalam hal ini adalah niat dan tekad Bersama (kesadaran kolektif) dalam Implementasi Makassar ta tidak rantasa antara masyarakat dan pemerintah kota makassar terkhususnya di kecamatan tamalate.

5. Kontinuitas perencanaan : Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan dan juga ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

Kontinuitas perencanaan dalam hal ini adalah lebih bagaimana keberlanjutan Koordinasi antar Organisasi Pemerintah dalam implementasi Program Makassar ta tidak rantasa di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Sehingga adanya kesemapahaman Bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam koordinasi tersebut. Dan dapat melakukan kerja sama yang baik dalam melaksanakan atau menjalankan kebijakan implementasi program Makassar ta' tidak rantasa. Dan mendapat hasil yang baik dari tujuan yang di inginkan Bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian di lakukan selama 2 bulan setelah dilakukannya seminar Proposal. Penelitian ini memilih lokasi di Kota Makassar Kecamatan Tamalate Kelurahan bongaya Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana lokasi ini menjadi objek penelitian saya mengingat bahwa di Kota Makassar di kecamatan Tamalate Kelurahan Bongaya masih ada masyarakat atau sebagian orang yang belum melaksanakan kebijakan pemerintah tentang program *Makassar ta' tidak Rantasa* dan masih bnyak warga sekitar yang belum mengerti implementasi Program *Makassar ta' tidak Rantasa* di kecamatan Tamalate Kelurahan Bongaya Kota Makassar.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hal ini di karenakan penelitian ini berupaya untuk mengetahui Koordinasi antar Organisasi Pemerintah dalam Implementasi kebijakan program Makassar ta' Tidak Rantasa di kecamatan Tamalate. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data menginjikan evaluator menggabungkan kekuatan dan kebenaran dari suatu sumber data. Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian Kualitatif ialah sebuah prosedur penelitian yang dimana dia menghasilkan data-data yang deskriptif berupa kata yang tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan juga

perilaku yang diamati. Juga memilah-milah data yang betul-betul terkait dalam judul penelitian yang di lakukan oleh peneliti.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang akan di gunakan ini ialah tipe deskriptif kualitatif yaitu penulis mencoba menggambarkan permasalahan yang terkait dengan koordinasi antar Organisasi pemerintah kota makassar dan masyarakat, menjelaskan data secara sistematis dan menginter pretasikan. Dasar pada penelitian ini adalah wawancara, yang melakukan dialog (wawancara) pertanyaan kepada informan yang isinya suatu pertanyaan-pertanyaan menyangkut atau mengenai hal yang ada hubungannya pada penelitian yang dilakukan tersebut. Dan mengumpulkan data yang relefan dari informan sebanyak-banyaknya.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah Data-data yang telah di peroleh peneliti dari hasil pengisian,wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti yaitu: Koordinasi antaar Organisasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta' tidak Rantasa dalam aspek Persampahan di Kecamatan Tamalate Kelurahan Bongaya Kota Makassar.

2. Data Skunder

Yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan Peraturan-Peraturan yang ada hubungannya dengan Koordinasi antar Organisasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta' Tidak Rantasa di Kecamatan Tamalate Kelurahan Bongaya Kota Makassar.

D. Informan Penelitian

Informan yaitu pihak yang di tentukan oleh peneliti yang akan memberikan informasi terkait obyek yang akan di teliti. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik purposive sampling, atau dikenal dengan tehnik penentuan sampel bertujuan, yaitu penentuan informan dengan mencari atau siapa tokoh yang memiliki pengetahuan terkait masalah yang di teliti. Teknik penentuan informan dalam hal ini di tempuh dengan mencari pihak yang terlibat langsung dalam program makassar ta' tidak rantasa.

Adapun Penentuan subjek atau informan berikut Dengan rinciannya :

No	Nama	Jabatan	Inisial	Keterangan
1	Kahfiani, S.Hut	Kasi pembangunan dan pengendalian persampahan dan linbah B3 DLH	KF	1 orang
2	1. M Naufal, S.sos 2. Syamsul, S.sos	1. Kasi perekonomian pembangunan dan pengembangan system informasi kec. Tamalate 2. Kasi Ketertiban dan Penegakan Perda Kec. Tamalate	NF SM	2 orang
3	1. Yetti Agus 2. Andi Rezki Basari	Staf kelurahan Bongaya	YA AR	2 orang
4	1. Rubiah 2. Bachtiar 3. Rahmat	Masyarakat	RH BR RT	3 orang
	Jumlah			8 Orang

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data di lakukan dengan *Natural Setting* yaitu (kondisi yang alamia), Sumber data primer, dan tehnik yang di gunakan dalam pengumpulan data lebih banyak pada saat observasi berperan beserta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2008:225). Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan Teknik-tehnik pengumpulan data yang melalui observasi, wawancara, dan dari dokumentasi didalam langka-langka mengumpulkan data-data untuk keperluan peneliti.

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati kegiatan informan dalam mempersiapkan media atau pada saat membuat model pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran dan pada waktu berlangsungnya proses-proses belajar mengajar. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data informasi dari informan yang telah di tentukan melalui proses tanya jawab seputar masalah yang di jadikan fokus penelitian, dalam hal ini penelitian akan membuat panduan pertanyaan sederhana yang akan di ajukan kepada narasumber. Kemudian langkah lainnya yang digunakan adalah mencari data dari data tertulis, berupa : arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majallah DLL. Hal ini dilakukan untuk menunjang data yang di peroleh di lapangan.

F. Analisis Data

Analisis data ialah suatu pekerjaan yang menyusun dan mencari data yang secara sistematis data yang di peroleh dari prihal wawancara, Dokumentasi dan catatan lapangan, dengan cara-cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan data dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, melakukan sintesia,

juga memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari untuk membuat kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif Analisi data juga dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan juga setelah selesainya di lapangan. Nasution dalam (sugiyono,2008:245), analisis sebenarnya telah dimulai semenjak merumuskan dan juga menjelaskan masalah-masalah, sebelum terjun langsung kelapangan, dan terus berlangsung sampai penulisan hasil penelitian.

Kegiatan yang terdapat pada analisis data penelitian ini, yakni : a). kegiatan reduksi data (*data reduktion*), di tahap ini peneliti akan memilih suatu hal-hal yang pokok dari data-data penelitian yang telah di dapat dari lapangan, terfokus pada hal-hal yang penting saja, mencari tema juga polanya dan merangkum. Proses reduksi ini di lakukan secara bertahap, dan juga sesudah pengumpulan data sampai pada laporan hasil. Penulis memilah data-data yang penting yang sangat berkaitan dengan fokus penelitian dan membuat kerangka penyajiannya. b). Penyajian data (*data display*), sehabis mereduksi data, dan maka langkah-langkah selanjutnya ialah *display* data. Pada dikegiatan ini, penulis juga menyusun kembali data-data berdasarkan kualifikasi dan pada masing-masing topik juga harus dipisahkan, kemudian topik yang juga sama di simpan didalam suatu tempat, lalu di beri tanda pada masing-masing tempat, untuk hal ini dalam memudahkan penggunaan data agar tidak terjadi kekeliruan. c). data yang di kelompokkan pada kegiatan kedua kemudian di teliti kembali dengan cermat, dilihat mana data yang telah lengkap dan data yang belum lengkap yang masi memerlukan data tambahan, dan kegiatan ini di laksanakan atau di jalankan pada saat kegiatan ini berlangsung. d). setelah data telah dianggap cukup dan telah

same pada titik jenuh atau Lelah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan simpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif. Penelitian ini tidak menguji hipotesis (akan tetapi, hipotesis kerja hanya digunakan sebagai pedoman) tetapi lebih merupakan penyusunan abstraksi berdasarkan data yang di kumpulkan. Analisis dilakukan lebih intensif setelah semua data yang di peroleh di lapangan sudah memadai dan di anggap cukup, untuk diolah dan di susun menjadi hasil penelitian sampai dengan tahap akhir yakni kesimpulan penelitian.

G. Keabsahan Data

Di dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument adalah penelitian itu sendiri. Maka sebab itu peneliti sebagai instrument juga harus “Divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap menjalankan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Dalam buku *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* sugiyono (2008:222), validasi yanf pada peneliti sebagai instrument yang meliputi validasi terhadap pemahaman-pemahaman metode pada penelitian kualitatif, penguasaan wawasan pada bidang-bidang yang diteliti, kesiapan persiapan peneliti yang untuk memasuki objek penelitian, baik secara logistik maupun akademiknya.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri. Namun, berikutnya setelah fokus penelitian sudah menjadi jelas maka akan dikembangkan instrument-instrument penelitian sederhana, yang juga diharapkan

dapat pula melengkapi data-data dan membandingkan juga dengan data-data yang telah di temukan melalui observasi dan wawancara. Dan yang juga melakukan validasi ialah peneliti itu sendiri.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Lokasi penelitian

1. Gambaran umum kota makassar

a. Sejarah kota Makassar

Nama makassar sudah di sebutkan dalam pupuh 14/3 Negarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu Daerah yang menaklukkan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa yang ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) di perkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan Kota Makassar. Dia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.

Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salasatu kota terbesar di Asia tenggara. Raja-raja makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketata, dimana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VCO (belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VCO. Pada tahun 1669, Belanda bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan

sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang di pimpin oleh belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda tangani perjanjian Bongaya.

b. Letak Geografis Kota Makassar

Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisir Pantai barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada Koordinat antara $119^{\circ} 18' 27,97''$ sampai $119^{\circ} 32' 31,03''$ bujur timur dan $5^{\circ} 30' 18''$ - $5^{\circ} 14' 49''$ lintang selatan. Ketinggian Kota ini bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20°C - 32°C , memiliki garis pantai sepanjang 32 Km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi, serta terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.

Dua sungai besar mengapit kota ini, yaitu : sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan di bagian barat dan utara, ada perairan selat Makassar. Jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan data dari badan pusat Statistik tahun 2016 yaitu 1.469.601 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar selain di pengaruhi oleh kelahiran alami juga dipengaruhi oleh arus migrasi dari daerah lain yang masuk ke Kota Makassar. Terutama untuk

melakukan Pendidikan, disamping karna daerah ini merupakan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di Kawasan Timur Indonesia.

c. Visi dan Misi Kota Makassar

Visi Kota Makassar 2005-2025 adalah **“Makassar sebagai Kota maritin, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”**. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategi daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 adalah **“Makassar Kota Dunia yang nyaman Untuk Semua”** Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Visi Kota Makassar yaitu:

1. Merekonstruksi nasib Rakyat menjadi masyarakat sejahterah standar Dunia
2. Merestorasi tata ruang Kota menjadi Kota nyaman berstandar Dunia
3. Mereformasi tata Pemerintah menjadi pelayanan Publik standar Dunia bebas Korupsi

d. Penduduk

Penduduk Kota Makassar menurut hasil sensus penduduk (SP) yang dilaksanakan oleh BPS Kota Makassar tahun 2016 berjumlah 1.469.601 jiwa dengan jumlah Pria 727.314 jiwa dan Wanita 742.287 jiwa. Untuk data

selengkapnya terkait masalah kependudukan di Kota Makassar berdasarkan badan pusat Statistik Kota makassar tahun 2016 simak pada table 1 (satu) berikut:

Tabel 1 : Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar.

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mariso	29,856	29,436	59,292
Mamajang	29,884	31,123	61,007
Tamalate	96,616	97,977	194,493
Rappocini	79,660	84,903	164,563
Makassar	42,048	42,710	84,758
Ujung Pandang	13,453	15,044	28,497
Wajo	15,164	15,769	30,933
Bontoala	27,579	28,957	56,536
Ujung Tanah	24,794	24,429	49,223
Tallo	69,739	69,428	139,167
Panakkukang	73,114	74,669	147,783
Manggala	69,541	69,118	138,659
Biringkanayya	100,978	101,542	202,520
Tamalanrea	54,988	57,182	112,170
Total	727,314	742,287	1,469,601

Sumber Data: BPS Kota Makassar

e. Pendidikan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa sasaran Pendidikan di titik beratkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenjang Pendidikan, yaitu mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Upaya peningkatan mutu Pendidikan yang ingin dicapai tersebut menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Makassar yang notabenehnya yang berwawasan luas untuk membangun Kota Makassar menuju Kota yang aman. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk untuk dapat memperoleh kesempatan Pendidikan yang seluas-luasnya.

2. Profil Instansi Obyek Penelitian

a. Pemerintah Kota Makassar (Dinas Lingkungan Hidup)

Organisasi Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kota Makassar sebagaimana Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Sejalan dengan dinamika yang ada, mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur perangkat

daerah tersebut berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, meliputi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Penataan Dan Penaatan, terdiri dari :
 1. Seksi Inventarisasi RPPLH Dan KLHAS
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 3. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 2. Seksi Konservasi lingkungan
 3. Seksi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Lingkungan
- e. Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Dan Pengendalian Sistrtem Persampahan Dan Limbah B3
 2. Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring Dan Evaluasi Persampahan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f. Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

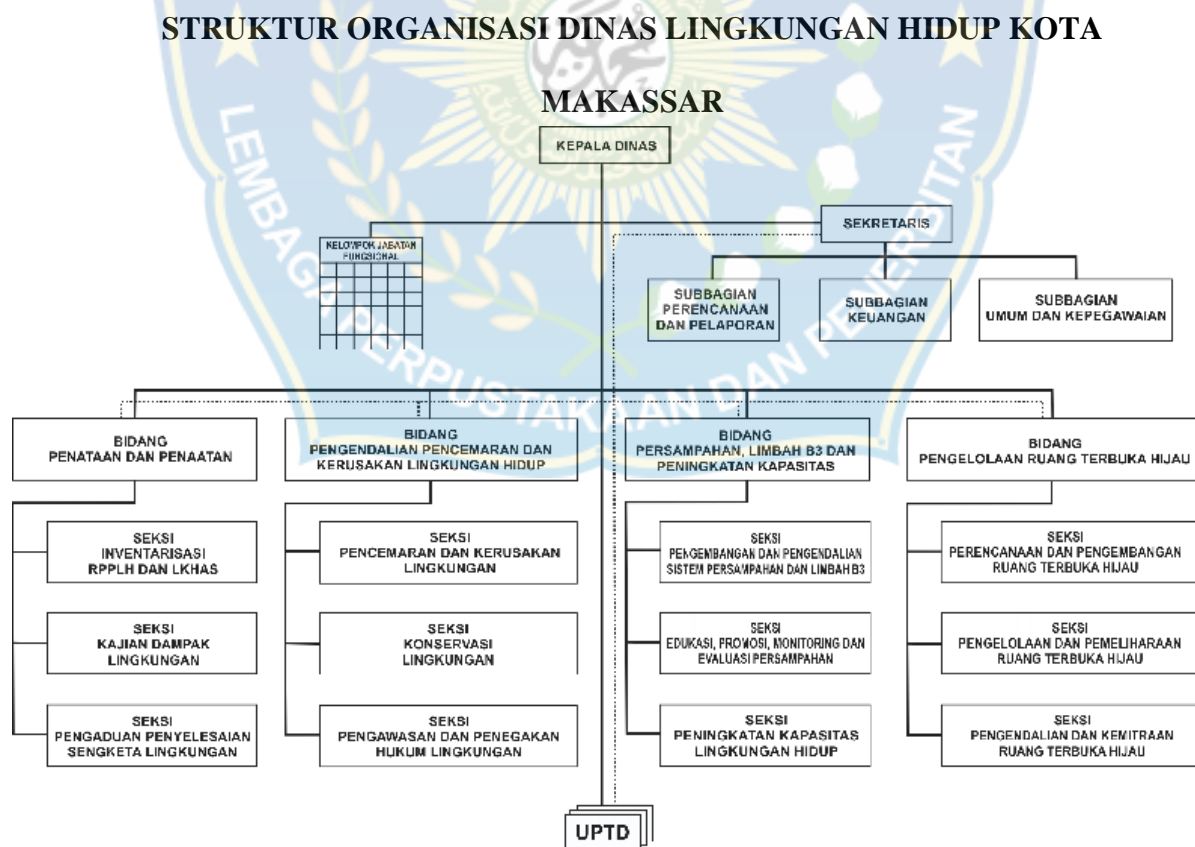
2. Seksi Pengelolaan Dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

3. Seksi Pengendalian Dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau

Struktur organisasi tersebut juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas terdiri dari :

1. UPTD tpa Sampah
2. UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah
3. UPTD Pemakaman
4. UPTD Laboratorium Lingkungan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar secara lebih jelas adalah sebagai berikut.:



Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar meliputi :

A. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali kota dalam membantu urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah.

B. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
5. Pembinaan, Pengoordinasian, Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Program dan kegiatan bidang Lingkungan Hidup.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

2. Merumuskan dan melaksanakan Visi Misi Dinas.
3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Penataan dan Penuaan PPLH, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Persampahan, Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
4. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas.
5. Mengkoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
6. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas.
7. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas.

8. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana.
9. Merumuskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Makassar.
10. Merumuskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Makassar.
11. Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran data/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kota Makassar.
12. Mengelola keanekaragaman hayati dalam wilayah Kota Makassar.
13. Melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dalam wilayah Kota Makassar.
14. Membina dan mengawasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan dalam wilayah Kota Makassar.
15. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan.
16. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota Makassar.
17. Menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya yang di terbitkan dan berdampak di Kota Makassar.

18. Mengelola, membina dan mengawasi pengelolaan persampahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta.
19. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian Teknik oprasional pengelolaan ke uangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
20. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah provensi ke pemerintah kota sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasikan permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari arternativ pemecahannya.
22. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkait dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
23. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pemimpin.
24. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
25. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional.
27. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis.

28. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

29. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh wali kota.

Seiring dengan Perkembangan Pembangunan Kota Makassar saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota Makassar selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019), maka Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Tahun 2017-2019 adalah:

Adapun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, sebagai berikut ;

Visi

“Mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang Nyaman dan Berwawasan Lingkungan”

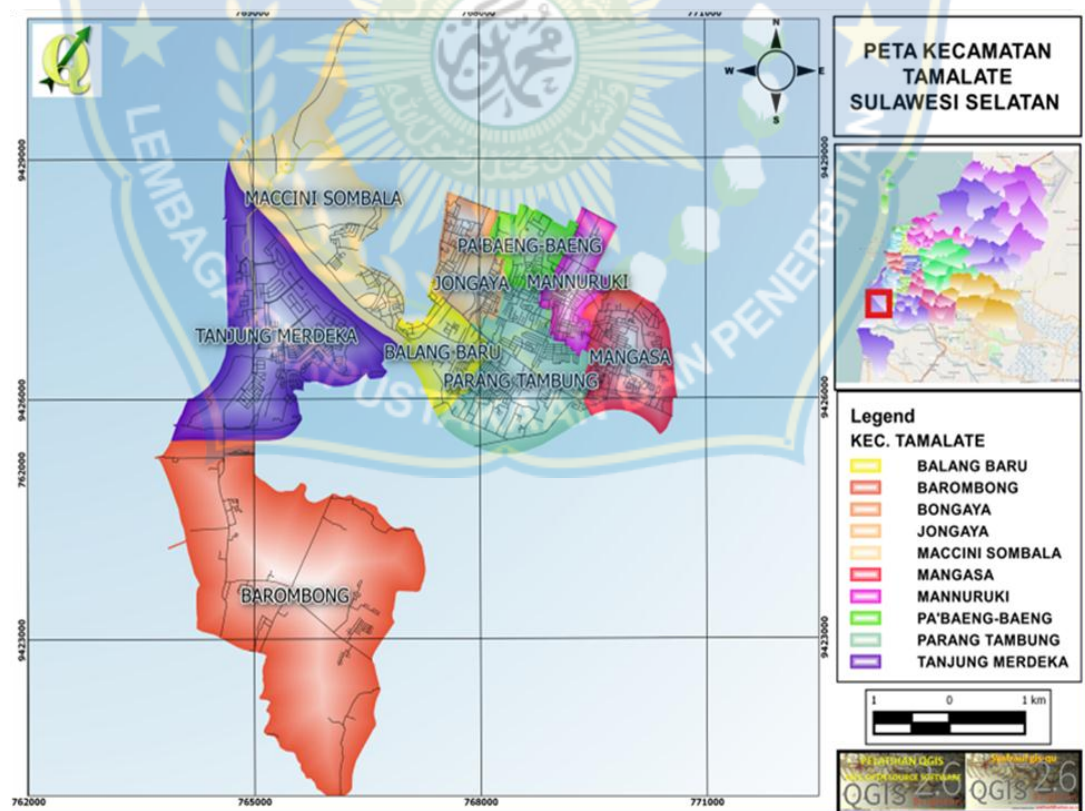
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Teknis Aparatur DLH yang didukung oleh Peningkatan Kualitas Intelektual, Mental Spritual, Keterampilan serta Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat untuk mendapatkan Lingkungan Hidup yang Nyaman.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Pemerintah Kota Makassar (Kecamatan Tamalate)

Kecamatan Tamalate yang merupakan bagian dari Kota Makassar yang mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam mendukung kedudukan Kota Makassar sebagai pusat pelayanan dan pengembangan di Propinsi Sulawesi Selatan bahkan sebagai pusat pelayanan bagi kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi pada rencana strategis perubahan ini. dengan dukungan unit-unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar termasuk Pemerintah Kecamatan Tamalate. Adapun gambaran peta di kecamatan tamalate dapat di lihat sebagai berikut :



Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Mamajang, disebelah timur Kabupaten Gowa, disebelah selatan Kabupaten Takalar dan disebelah barat dengan Selat Makassar. Dengan luas wilayah kurang lebih 20,21 km persegi, dibagi dalam 11 Kelurahan. Sebanyak 3 Kelurahan di Kecamatan Tamalate merupakan daerah pantai dan 8 Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi dibawah 500 meter dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing Kelurahan ke ibukota Kecamatan bervariasi antara 1-2 km (Maccini Sombala dan Balang Baru), antara 3-4 km (Jongaya, Bontoduri dan Parang Tambung), Kelurahan lainnya berjalarak 5-10 km.

Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km persegi, terluas kedua adalah Kelurahan Tanjung Merdeka dengan luas wilayah 3,37 km persegi, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Bungaya yaitu 0,29 km persegi. Rasio jenis kelamin adalah sekitar 97,77% yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang penduduk laki-laki. Penduduk Kecamatan Tamalate mempunyai mata pencaharian yang beragam terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pedagang serta sektor publik dan jasa lainnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Kawasan Bisnis dan Pariwisata terpadu ("**Tanjung Bunga**" **Waterfront City**)

Kawasan Bisnis dan Pariwisata terpadu yang masuk dalam kawasan Tanjung Bunga dimana telah terdapat kawasan Pariwisata seperti Permandian Alam Tanjung Bayang, Tanjung Bunga sementara untuk bisnis telah banyak

dibangun pusat perekonomian seperti Hotel, Mall dan Perumahan serta Sekolah International.

2. Kawasan Budaya Terpadu (“Somba opu” Cultural Park)

Kawasan Budaya ini, terletak di area Benteng Somba opu di sebelah selatan Kota Makassar, Benteng Soba opu pernah menjadi ajang pertempuran sengit antara serdadu dan prajurit kerajaan gowa pada masa itu yang disebut “Perang Makassar” terbukti dengan terdapatnya meriam yang jumlahnya kurang lebih 272 buah untuk melindungi benteng termasuk satu yang diberi nama ‘Anak Makassar’ dan 30.000 peluru meriam yang ditembakkan oleh VOC. selain itu di Benteng Soba Opu terdapat Rumah-Rumah Adat Sulawesi Selatan yang berada dikawasan Miniatur Sulawesi.

3. Kawasan Olah Raga Terpadu (“Barombong” Sport City)

Untuk Kawasan Olah Raga Terpadu berada di Kelurahan Barombong Kawasan ini akan dijadikan sebagai Pusat Olah Raga Sul-Sel dan akan menjadi ikon baru Kota Makassar, sekarang dalam tahap pekerjaan.

4. Kawasan Strategis Sungai Jene’berang Terpadu

Adalah kawasan strategis kepentingan lingkungan yang diarahkan dan diperuntukkan pada pengembangan dan perlindungan daerah aliran sungai. Kawasan strategis sungai je’ne berang terpadu yang bermuara disebelah selatan kota Makassar merupakan sungai yang melintasi kota Makassar dengan kab.gowa. Eksistensi sungai je’ne berang sebagai media penyimpan air baku potensial(Long storage) yang mendapat pengaruh dinamika kompleksitas dari DAM Bili-Bili, sensitivitas kondisi sungai Jene’berang dengan kawasan-kawasan lainya dalam

hal upaya mitigasi khususnya bencana banjir dan konektivitas sungai”berang sebagai media transisi moda transportasi antara darat dan laut

Dari empat Rencana Kawasan tersebut diatas dapat dipastikan Kecamatan Tamalate adalah sebagai gerbanbang Kawasan Ekonomi baru Kota Makassar karna itu SKPD Kecamatan Tamalate dituntut untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan `meningkatkan Inprastruktur Lingkungan yang nyaman, rama, dan indah. Dan lebih jelasnya tentang kecamatan tamalata ada di table berikut :

Tabel 2: luas areal jumlah RT/RW, Rumah Tangga, Dan Penduduk Kecamatan Tamalate.

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	RT	RW	JUMLAH RUMAH TANGGA (KK)	PENDUDUK		
						L	P	JUMLAH
1	BAROMBONG	1.54	69	13	2.683	7363	5803	13166
2	MACCINI SOMBALA	3.37	72	9	4.470	7238	7296	14534
3	TANJUNG MERDEKA	0.29	31	8	1.894	4001	4134	8135
4	PA'BAENG-BAENG	1.18	38	10	4901	7230	6729	13959
5	JONGAYA	0.51	56	14	2412	5985	5994	12499
6	BALANG BARU	7.34	57	10	3.451	11444	11579	23023
7	BONGAYA	1.38	46	12	1.929	5211	5441	10652
8	MANNURUKI	2.03	30	8	3.120	6003	5273	11276
9	MANGASA	0.53	58	13	9,037	9515	9728	19240
10	PARANG TAMBUNG	1.36	66	9	4.417	10126	10451	20577
11	BONTO DURI	0.68	43	7	3.988	7561	7858	15419
JUMLAH		20.21	566	113	42.302	81677	80286	162480

c. Pemerintah kota Makassar (Kelurahan Bongaya)

Adapun beberapa peran organisasi pemerintah yang berkonflik langsung pada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yaitu Kelurahan. Kelurahan Bongaya adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kelurahan bongaya adalah pemekran dari Kelurahan Jongaya itu sendiri. Luas kelurahan Bongaya 29,83Ha, dan terdapat diantaranya 12RW dan 46RT. Adapun Profil-profil mengenai Kelurahan Bongaya sebagai berikut :

	Penduduk	Agama	Sarana Ibadah	Sekolah
KK	5770			
laki- laki	5221			
Perempuan	5448			
	total = 10669			
Islam		7302		
Kristen		3302		
Katolik		174		
hindu		0		
Budha		61		
Masjid			5	
Mushollah			3	
gereja			3	
TK				4
SD				3
SMP				2
SMA				5

Adapun Visi dan Misi yang dimiliki Kelurahan Bongaya dalam Menjalankan Kewajibannya yaitu sebagai berikut.

Visi

Memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat dan menyenangkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

Misi

1. Memberikan kenyamanan pelayanan sesuai kebutuhan dengan cepat dan tepat.
2. Menciptakan suasana kekeluargaan dalam pelayanan dengan mengutamakan aturan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan secara adil, tertib, transparansi dan akuntabel.

B. Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi kebijakan Makassar ta tidak rantasa dalam aspek persampahan.

Koordinasi adalah salah satu system fungsi dari manajemen yang memegang peranan-peranan yang sama pentingnya dan juga beserta dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pada dasarnya, setiap pihak yang terlibat dalam Koordinasi haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan di capai. Dengan demikian walaupun memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang berbeda, dalam hal ini Dinas lingkungan hidup, Kecamatan dan kelurahan Kota Makassar. Namun Koordinasi yang dilakukan oleh ke tiga Lembaga tersebut semua itu adalah dalam rangka saling melengkapi atau membantu agar tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, pola Koordinasi yang efektif memiliki indikator-indikator penting yang menjadi acuan penting bagi

tercapainya tujuan bersama tersebut. Adapun indikator Koordinasi yang menjadi acuan adalah sebagai berikut :

1. Komonikasi : ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi dan ada tidaknya teknologi informasi.
2. Kesepakatan dan komitmen : ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksanaan kegiatan dan dan ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan.
3. Kontinuitas perencanaan : ada tidaknya umpan balik dan ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

Koordinasi yang dilakukan oleh Organisasi pemerintah Kota Makassar, pada dasarnya adalah merupakan kesadaran kolektif yang dibangun dalam rangka menyadarkan masyarakat dalam pentingnya kebersihan lingkungan.

1. Komonikasi dalam implementasi kebijakan *makassar ta tidak rantasa*

Pola Koordinasi dengan melakukan Komonikasi yang baik dan efektif sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang di laksanakan oleh masyarakat di kelurahan Bongaya kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dalam hal ini kebijakan yang di berikan oleh pemerintah dalam pengamatan masi banyak masyarakat yang belum memahami kebijakan tersebut dan belum menjalankannya. Maka bentuk Pola Komonikasi dalam koordinasi sangat berperan penting dalam menyampaikan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai hasil yang maksimal. Secara analisis komonikasi memang sangat penting untuk menjalin hubungan yang lebih dalam anatar

Pemerintah dan Masyarakat agar mencapai tujuan yang di inginkan bersama dan dapat bermanfaat kedepannya untuk masyarakat dan Pemerintah.

Kota makassar adalah kota yang padat dengan penduduk, di karnakan kota makassar adalah kota yang di mana penduduk dari luar berdatangan untuk mencari pekerjaan, dan bukan hanya itu saja adapun yang menempu Pendidikan di kota makassar ini dan itulah sebagian penyebab kota makassar padat dari penduduk. Dengan padatnya penduduk di Kota Makassar akhirnya berdampak Pada Produksi sampah perharinya bias sampai Puluhan Ton. Dan maka dari untuk tetap menjaga kebersihan di kota Makassar maka pemerintah Kota Makassar mengeluarkan kebijakan Makassar ta tidak rantasa, yang dimana arti dari kalimat tersebut Kota Makassar bebas dari Sampah yang berserakan atau berhamburan dan kota yang nyaman di pandang mata. Adapun factor-faktor yang di mana penyebab pemerintah Kota Makassar membuat kebijakan Makassar ta tidak Rantasa, sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat produksi Sampah
2. Kurangnya kesadaran Masyarakat
3. Kurangnya pengolahan akan sampah

Berhubung dengan beberapa factor diatas sehingga di butuhkan Komonikasi yang intens dari pemerintah dan Masyarakat dalam melakukan komonikasi ataupun sosialisasi terkait dengan Persampahan di kota Makassar yang dapat menimbulkan masalah kedepannya. adapun komonikasi yang di lakukan oleh organisasi pemerintah terkait hal tersebut :

“Dalam Organisasi Pemerintah Komonikasi yang dilakukan yaitu secara lisan maupun tulisan. Di kelurahan itu sendiri Komunikasi juga dilakukan

secara lisan baikpun secara tulisan. Contoh dalam Kelurahan memberikan Komunikasi lisan yaitu dengan memberikan Seminar Program terhadap masyarakatnya dan di bantu oleh RT dan RW dalam menyampaikan informasi tertentu. Secara tulisan Organisasi Pemerintah dalam hal ini yaitu Kelurahan membuat Group Media sosial dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang dimana anggota dalam group yang di buat baik itu dari RT,RW dan Masyarakatnya.”

(Wawancara dengan Ibu YA, tanggal 21 Februari 2019 pukul 09.30

WITA)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kelurahan melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan untuk pembahasan terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota Makassar terkhusus dalam kebijakan Implementasi Makassar ta' tidak rantasa di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Bongaya Kota Makassar. Dengan bantuan media sosial Sosial pemerintah mendapat keringanan dalam berkomunikasi dengan masyarakat untuk membantu program kebijakan Pemerintah dan mensejahterahkan rakyatnya.

Adapun berikut ini yang dimana kutipan hasil wawancara penulis dengan Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup terkait masalah Kominikasi yang dilakukan dalam Implementasi Makassar ta tidak rantasa sebagai berikut :

“Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri kami Menjalin Komonikasi dengan Organisasi Pemerintah lainnya contohnya dengan Kecamatan dan kelurahan yang di mana Secara lisan maupun tulisan. Dalam lisan ini yang dimaksud disini yaitu mengadakan rapat dalam menjalankan suatu bentuk program dalam implementasi kebijakan Makassar ta tidak rantasa' secara langsung. Jika dalam soal tulisan kami membuat suatu informasi komunikasi di media Online atau Sosial Media, dan apa bila terjadi suatu kegiatan yang mendadak kami juga menggunakan media Online sebagai Kominikasi dalam Penyampain yang lebih Cepat untuk Organasasi pemerintah lainnya”.

(wawancara dengan Ibu KF pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 09.15

WITA).

Dari hasil wawancara di atas telah kita ketahui bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah melakukan komunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan Kecamatan dan Kelurahan dalam hal implementasi kebijakan Makassar ta tidak rantasa yang terjadi di Kota Makassar yang dimana salah satu contohnya yaitu rapat langsung yang di adakan oleh pihak Dinas BLH dalam Koordinasi antar Organisasi Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Makassar ta tidak rantasa. Dinas Lingkungan Hidup juga menggunakan media online atau media sosial untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan cepat.

Adapun hasil wawancara penelitian dari pihak Kecamatan terkait masalah komunikasi yang di lakukan antar Organisasi pemerintah dalam menyampaikan implementasi kebijakan Makassar ta tidak rantasa di kota Makassar sebagai berikut.

“Terkait dengan komunikasi dalam permasalahan persampahan atau implementasi tentang kebijakan Makassar ta tidak rantasa itu ada salah satu sosialisasi yang di lakukan tiap tahunnya dengan bekerjasama dengan kelurahan yang dimana kita sebagai pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyampaikannya. Adapun dengan beberapa media yang ada kami sampaikan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan makassar ta tidak rantasa kepada pihak kelurahan dan RT/RW ataupun masyarakat secara tertulis melalui media online tersebut”.

(Wawancara dengan bapak NF. Pada tanggal 22 Februari 2019 pukul

13.40 WITA).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa Organisasi pemerintah terkhususnya Kecamatan Tamalate dalam hal berkomunikasi biasanya sering melakukan seminar sosialisasi atau rapat kerja dengan Organisasi pemerintah lainnya dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Makassar ta tidak rantasa di kelurahan bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar . dengan

mengadakan sosialisasi Pemerintah lebih mudah lagi berkomunikasi untuk menjalankan kebijakan Makassar ta tidak rantasa ini dan mempererat hubungan masyarakat dan Pemerintah.

Berhubungan dari wawancara penelitian yang di atas maka peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat terkait komunikasi yang dilakukan dalam Koordinasi yang di lakukan Organisasi Pemerintah daerah dalam Implementasi kebijakan Makassar ta tidak rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan sebagai berikut :

“Komunikasi yang di berikan organisasi pemerintah kepada masyarakat sudah jelas dengan secara langsung dan juga dengan lewat media massa. Pemerintah mengadakan sosialisasi dengan kami dengan membangun komunikasi yang baik dan ikut membantu terjun kelapangan dengan kami saat sedang menjalankan Program Implementasi Makassar ta tidak rantasa di kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar ini. Adapun komunikasi yang di lakukan Pemerintah dengan bekerja sama dengan RT/RW dalam menyampaikan sebuah pesan atau kebijakan dari pemerintah untuk masyarakat”.

(Wawancara dengan Ibu RH, pada tanggal 27 Februari 2019. Pada pukul.16.15 WITA)

Dari hasil wawancara diatas, bias kita ketahui bahwa Komunikasi Organisasi Pemerintah dalam implementasi Kebijakan Makassar ta Tidak Rantasa sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan Masyarakatpun juga sangat merespon kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Oleh Pemerintah. Karna dengan adanya itu masyarakat bias mengetahui dengan jelas pentingnya kebersihan lingkungan dan dampak dari Sampah itu sendiri sehingga jauh dari kata Rantasa.

Dari semua hasil wawancara penelitian di atas, penulis menyimpulkan dengan apa yang sudah sesuai yang terjadi di lapangan bahwa Pemerintah dalam

Implementasi kebijakan Makassar ta Tidak Rantas dalam aspek Persampahan di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar telah melakukan Komunikasi dengan Baik, salah satu bukti yaitu Pemerinrah Dinas DLH,Kecamatan Dan Kelurahan sering Mengadakan Sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan juga untuk lebih mendalami tentang kebersihan itu sendiri. Selain dari itu Pemerintah juga turut membangun ikatan emosional dengan masyarakat dengan adanya sosialisasi yang di adakan pemerintah untuk rakyat dan membangun Komunikasi yang baik pula.

2. Kesepakatan dan Komitmen

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (offerte) dan penerimaan. Sedangkan komitmen yang artinya adalah suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian (keterikatan), baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan/ perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa.

Dalam pelaksanaan Koordinasi antar Organisasi Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Makassar ta Tidak Rantas di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar terkait dengan kesepakatan dan komitmen dalam Melakukan Koordinasi adalah dengan Mengadakan Suatu Komitmen bersama dan Bersama-sama pula dalam proses pelaksanaan agenda yang telah di sepakati bersama. Kesepakatan bersama adalah wujud dari Konsistensi dari

aparatur yang terlibat langsung di dalamnya maupun tidak langsung dalam agenda yang telah di sepakati bersama.

Mengenai tentang kesepakatan dan komitmen yang telah diterangkan di atas maka adapun hasil wawancara yang telah dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui kesepakatan dan komitmen tentang Koordinasi implementasi kebijakan Makassar ta Tidak Rantasa dalam aspek persampahan sebagai berikut:

“Sebagai bentuk kesepakatan dan komitmen bersama, yang kami lakukan yaitu kami Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Kecamatan Tamalate sepakat mengadakan seminar Sosialisasi kepada tiap-tiap kelurahan yang ada di kecamatan tamalate dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebersihan. Adapun juga tentang kesepakatan yang kami buat dengan kecamatan dan kelurahan yang dimana berpatokan dengan Perda tentang Persampahan untuk meninjau lanjuti masyarakat yang kedapatan di tempat yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan langsung di olah prosedurnya”.

(Wawancara dengan Ibu KF pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 09.15

WITA).

Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk kesepakatan dan Komitmen bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pihak Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Bongaya Kota makassar adalah dengan selalu menggelar sosialisasi tentang pentingnya kebersihan bagi masyarakat dan kita semua.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan kepada staf Kecamatan Tamalate mengenai kesepakatan dan komitmen sebagai berikut.

“Terkait dalam masalah kesepakatan ini kita membuat suatu rapat dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi pemerintah lainnya yang dimana dalam pembahasan kami mengacuh pada kesepakatan-kesepakatan

untuk menjalankan kebijakan makassar ta tidak rantasa. Dalam hal kesepakatan ini kami dan juga organisasi pemerintah lainnya membuat kesepakatan yang di mana isi dari kesepakatan ini mengaju pada tangkapan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan memberikan sanksi langsung bagi pelanggar tersebut. Tidak hanya itu kami dan organisasi pemerintah yang lainnya salah satunya yaitu kelurahan sepakat mengadakan sosialisasi di tiap-tiap kelurahan agar dapat membantu masyarakat tentang memahami yang Namanya kebersihan lingkungan dan memberitahukan peraturan-peraturan yang ada mengenai masalah persampahan agar sekiranya mereka melaksanakan dan menaati peraturan”.

(Wawancara dengan bapak SM, pada tanggal 22 Februari 2019 pada pukul

14.15 WITA)

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui kesepakatan dan komitmen yang telah dilakukan yaitu mengadakan rapat tentang bekerjasama dengan organisasi pemerintah lainnya dalam menjalankan implementasi kebijakan Makassar ta tidak rantasa di kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Selain itu juga pemerintah bertinggak tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar kebijakan agar mereka dapat menyadari perilaku yang mereka perbuat sangatlah kurang baik dan juga akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga orang lain di sekitarnya.

Sementara itu adapun hasil wawancara yang di lakukuan di kelurahan Bongaya dengan staf kelurahan mengenai kesepakatan dan Komitmen yakni sebagai berikut.

“Mengenai kesepakatan antar Organisasi pemerintah, kami memiliki kesepakatan dengan Kecamatan. Dimana dalam kesepakatan ini pihak Kecamatan dan kami membuat suatu program Sosialisasi ke masyarakat yang dimana kami dari kelurahan dan dari Kecamatan saling bantu untuk melaksanakan sosialisasi tersebut yang di mana tujuan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih kepada masyarakat. Dalam kesepakatan ini kami dari Kelurahan dan dari Kecamatan

mempunyai tujuan yang sama untuk menjalankan kebijakan Makassar ta tidak rantasa di kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. (Wawancara dengan Ibu AR staf kantor Kelurahan Bongaya, tanggal 21 Februari 2019 pukul 10.00 WITA)

Dari hasil wawancara tersebut di atas kita dapat mengetahui bahwa terkait dengan kesepakatan dan Komitmen bersama, Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Bongaya bekerja sama dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang pentingnya kebersihan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berperan penting bagi masyarakat dalam mengatur ketertiban yang ada dan memberikan pelayanan yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan public yang dimana bertujuan memakmurkan masyarakat.

Sementara itu peneliti juga telah melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di kelurahan Bongaya sebagai berikut :

“Mengenai kesepakatan antara organisasi pemerintah dalam hal ini saya rasa mungkin cukup bagus yang di mana kami pada masyarakat umumnya di berikan suatu informasi yang penting atau pengetahuan tentang kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah dalam masalah persampah yang ada di kelurahan bongaya ini. Secara tidak langsung pemerintah membimbing kami dalam menycapai suatu tujuan yang dimana syarakat hidup sejahtera”.

(Wawancara dengan bapak BR, pada tanggal 28 Februari 2019 pada pukul 14.16 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan beberapa Informan penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa Komitmen dan Kesepakatan antara Pemerintah daerah Kota Makassar tentang kesepakatan dan komitmen yang di lakukan untuk menunjang berjalannya implementasi kebijakan Makassar ta Tidak rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Dengan adanya tugas tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan Implementasi kebijakan Makassar ta tidak Rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar maka masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya Kesepakatan dan Komitmen.

3. Kontinuitas perencanaan

Keberlanjutan suatu kegiatan memang sangat dibutuhkan apalagi berkaitan dengan kegiatan implementasi kebijakan makassar ta tidak rantasa yang saat ini sedang di kerjakan oleh pemerintah Kota Makassar. Komitmen dari semua bentuk dasar kepentingan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pencapaian hasil yang optimal. Keberlanjutan dari implementasi Kebijakan Makassar ta tidak Rantasa dapat memberikan umpan balik yang dapat di jadikan sebagai bahan Evaluasi Pemerintah dalam Kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kecamatan Tamalate Dan Kelurahan Bongaya. Dengan demikian apa yang menjadi kekurangan pada kinerja pemerintah sebelumnya dapat memberikan dorongan Pemerintah kedepannya agar Lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai Pelayan Publik.

Dari beberapa uraian diatas, maka untuk menjelaskan berbagai upaya ataupun agenda dari kelanjutan mengenai Implementasi Kebijakan Makassar ta tidak rantasa di kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan mewawancarai staf kantor Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

“Dalam hal ini hubungan masyarakat dan Pemerintah terjalin dengan baik dalam kelanjutan Program Makassar ta tidak rantasa. Mengenai keberlanjutan program ini, pemerintah berencana mengadakan TPS 3R yang dimana memberikan sinergitas bagi masyarakat dan pemerintah yang di mana masyarakat adalah obyek”.

(wawancara dengan Ibu KF pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 09.15 WITA).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat di ketahui bahwa keberlanjutan Implementasi Makassar ta tidak rantasa masi menjadi skala prioritas kinerja Pemerintah. Hal ini terus dilakukan agar kiranya dapat megetahui sejauh mana tindakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan dalam aspek kebersihan di masyarakat.

Sejalan dengan itu, hasil wawancara terhadap salah satu staf kecamatan memberikan informasi sebagai berikut :

“Mengenai keberlanjutan program ini, kami dari pemerintah Kecamatan telah membuat sosialisasi khusus. Dimana pada sosialisasi ini bukan hanya pemerintah yang berbicara mengenai kebijakan tetapi masyarakatpun ikut berbicara dan memberikan masukan pada pemerintah dalam menjalankan Kebijakan Makassar ta tidak rantasa ini. Dimana tujuan pemerintah yaitu agar dapat menjalin ikatan yang kuat dengan masyarakat”.

(Wawancara dengan bapak NF. Pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 13.40 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa Implementasi kebijakan Makassar ta tidak Rantasa di kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar masi berjalan dan juga keikut sertaan masyarakat di dalamnya membantu dan memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya adalah hasil wawancara Penelitian dengan staf Kelurahan Bongaya terkait keberlanjutan mengenai kebijakan Makassar ta tidak rantas.

“Keberlanjutan Program Makassar ta Tidak rantasa ini saya rasa sedang berjalan dengan baik.dimana kami dari pemerintah Membuat program-program yang lebih lagi untuk mengajak masyarakat dalam mencintai lingkungan. Dalam hal ini program yang kami lakukan itu sala satunya yaitu Lorong garden. Dimana kami memerintahkann RT/RW dan

masyarakat dalam pembenahan Lorong garden dan menghiasinya dengan indah”.

(Wawancara dengan Ibu YA staf kantor Kelurahan Bongaya, tanggal 21 Februari 2019 pukul 09.30 WITA)

Mengenai dari hasil wawancara yang di lakukan di kantor kelurahan Bongaya di atas, dapat di simpulkan bahwa keberlanjutan Program implementasi Kebijakan Makassar ta Tidak rantasa masi berjalan dengan baik. Dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat terjalin cukup baik dan memberikan dampak positif kedepannya.

Adapun wawancara yang di lakukan kepada masyarakat mengenai kelanjutan program Implementasi Kebijakan Makassar ta tidak Rantasa sebagai berikut :

“Menurut saya yang dilakukan pemerintah mengenai kelanjutan implementasi kebijakan makassar ta tidak rantasa ini sudah berjalan dengan baik. Dimana pemerintah saat ini khususnya kantor kelurahan Bongaya sering mengadakan sosialisasi kebersihan dan mengajak masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Salasatu contohnya ialah mengajak kerja bakti yang dimana RT dan RW sebagai penyalur pemerintah ke masyarakat”.

(Wawancara dengan bapak RH. Pada tanggal 20 Februari 2019. Pukul 16.00 WITA)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diatas dapat diketahui Kontinuitas Perencanaan masi dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini. Dimana salah satunya yaitu dengan sosialisasi dan Kerjabakti bersama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat. Tetapi masi ada masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya kebersihan dan menjaga lingkungan yang dimana akan berdampak pada diri mereka sendiri kedepannya. Pemerintahpun berharap

kedepannya dapat dengan kerja sama antar organisasi Pemerintah dapat mewujudkan Makassar ta tidak rantasa.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan terkait Implementasi kebijakan Makassar ta tidak rantasa. Adanya Koordinasi antar Organisasi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini Koordinasi dalam organisasi Pemerintah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adapun beberapa program yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan Kebijakan Makassar ta tidak rantasa ini sebagai mana yang telah tertulis di wawancara diatas. Adapun masukan-masukan yang di terima oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan dapat membantu Pemerintah dan masyarakat itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah di uraikan dan di kemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah kesimpulan. Koordinasi antar Organisasi pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta tidak rantasa dalam aspek persampahan di kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan hasil Penelitian Pada tiga (3) Point indikator Koordinasi yang baik dan Efektif Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi Pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan dalam Implementasi kebijakan Makassar ta tidak rantasa di kota Makassar sudah dilakukan dengan baik. Dimana salah satu bukti yakni Kerjasama antara Organisasi Pemerintah dalam mengadakan Sosialisai ke masyarakat dengan cara memberikan pemahaman mengenai Pentingnya kebersihan Lingkungan dan Kesehatan mengenai kebersihan.
2. Kesepakatan dan Komitmen Organisasi Pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan sepakat mengadakan Sosialisasi di tiap-tiap waktu yang telah di sepakati. Dan tidak hanya itu dalam sosialisasi ini mereka juga memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan yang ada dalam Persampahan.

3. Kontinuitas perencanaan dalam Implementasi Program Kebijakan Makassar ta tidak raantasa ini masi terlaksanakan salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah turuntangan langsung dalam membantu masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah di uraikan oleh penulis, maka di kemukakan beberapa saran, yakni sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungannya perlu di bangun. Kerugian yang berdampak pada masyarakat mengenai kurangnya sedaran kebersihan lingkungan harus di publikasikan secara menyeluruh lagi, guna membangkitkan kepedulian dan kecintaan masyarakat kepada lingkungannya.
2. Perlu adanya peningkatan wawasan dan integritas para Penegak Hukum dalam mengatasi beberapa Pelanggaran tentang implementasi Kebijakan Makassar ta tidak rantasa.
3. Pemerintah Kota Makassar mungkin sekiranya dapat lebih telitih lagi dalam menganalisa apakah kebijakan yang telah dijalankan berjalan menyeluruh atau belum. Pemerintah harus lebih membuka wawasan juga untuk dapat lebih muda dalam menjalankan implementasi kebijakan Makassar ta tidak rantasa di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, s. 2013.** *Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat sebagai upaya menjaga ekosistem dan koseravasi lingkungan di dieng plateau.* Jurnal organisasi dan manajemen. 9 (2); 135-144.
- Anangkota, Muliadi,** *klasifikasi system pemerintahan prespektif pemerintahan modern kekinian,* Jurnal Ilmu pemerintahan, Vol,3 No,2
- Asgun, S. 2014.** *Kebijakan makassar tidak rantasa.* Retrieved November 3, 2018, from <http://susanaasgun.blogspot.co.id/2014/11/kebijakan-makassar-tidak-rantasa.html>
- Azikin, Yamlik,** *komonukasi partisipatif aparat kelurahan dalam mendukung makassar kota dunia melalui program kebersihan lingkungan "makassarta tidak rantasa"* Jurnal Komonikasi Kareba Vol,4 No,4 Oktober-Desember 2015
- Fatmawati,** *Strategi Pemerintah Dalam Program Makassar Tidak Rantasa.* Jurnal Administrasi Publik Vol,2 No,3 Desember 2016
- Handoko, T. Hani. 2003,** *manajemen,* Edisi ke II, Yogyakarta:BPFE
- Hasibuan, Malayu, 2011.** *Manajemen; Dasar, pengertian dan masalah* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi aksaraSyafiie, Inu kencana. 2011, manajemen pemerintah, cetakan pertama. Bandung: Pustaka RekaCipta
- Hamdan,** *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota makassar.* Jurnal Administrasi Publik, Vol,6 No,2 Thn 2016
- Himam, Fatul,** *inovasi pada organisasi pemerintah : tahapan dan di namakika.* Jurnal psikologi vol, 2 No, 1 Thn 2016
- Idrus, Iqbal Aidar,** *Implementasi Kebijakan Makassar ta' Tidak Rantasa Pemerintah Kota Makassar,* Jurnal Administrasi Publik, VOL,3 No,1 Thn 2017
- Jusman Muhammad,** *Sinegritas kebijakan program Makassar ta' tidak rantasa di kota makassar,* Jurnal ilmu administrasi Vol 6, No 1 Thn 2017.
- Mirwan, M. 2013.** *Optimalisasi koordinasi pemerintah tingkat kecamatan di kecamatan kota bangun kabupaten kutai kartanegara.* Jurnal administrasi negara. 1 (2): 611-624
- Martini, Tini,** *Koordinasi pengelolaan program jaminan sosial thn,2015:14*

- Nasrulhaq, 2017.** *Implementasi LISA (lihat sampah ambil) program makassarta tidak rantasa di Universitas Muhammadiyah Makassar.* Jurnal Kebijakan Publik
- Nurasa, Heru,** *analisis organisasi pemerintah daerah khusus ibu kota jakartaa sebagai sebuah system yang terbuka.* Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol,15 No, 1 Thn 2013
- Rudianto, yayan,** *Implementasi kebijakan penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal pada dinas kebersihan, pertamanan, dan pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi.* Jurnal Administrasi Kebijakan Publik. Vol,1 No,2 Thn 2012
- Sembiring, M. 2012.** *Pelaksanaan tugas kecamatan guna memberdayakan pemerintah sebagai pusat pelayanan masyarakat,* MIMBAR. 28(1): 1-8.
- Soewarno Handayaniingrat,** *administrasi pemerintahan dalam pembangunan nasional (1991),* dalam jurnal administrasi public, vol 6, No. 1 thn. 2016 (diakses 9 Maret 2018).
- Syafiie, inu Kencana. 2011,** *Manajemen Pemerintahan,* cetak pertama bandung: pustaka Reka Cipta.
- Sugiyono. 2008.** *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* Bandung: ALFABETA.

L

A



P

I

R

A

N

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Arjan Tofani Rukman lahir di majene pada tanggal 16 Januari 1996, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Rukman S Padang dan Ibunda Nur Hayati Noer. Penulis memulai jenjang pendidikannya di Tk Djihadiah Lipuh dan dan melanjutkan jenjang ke SD Negeri 06 Kampung Baru, dan melanjutkan ke SMP Negeri 2 Majene, dan setelah itu lanjut lagi ke SMA Negeri 2 Majene dan selesai pada tahun 2014. Setelah mengakhiri jenjang Pendidikan di SMA Negeri 2 Majene, Pada awal Agustus tahun 2014 penulis telah tercatat sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Lulus di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Dan pada akhirnya Penulis Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S.1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Pada Tahun 2019.